SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA

APRIL 2025

AMNESTY INTERNATIONAL

AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia dimana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Visi kami adalah tempat para penguasa menepati janjinya, menghormati hukum internasional, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami percaya bertindak dalam solidaritas dan dengan hati bersama semua orang dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

Amnesty International adalah gerakan imparsial. Kami tidak mengambil posisi apa pun tentang isu kedaulatan, sengketa teritorial atau pengaturan politik atau hukum internasional yang mungkin diadopsi untuk pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri. Oleh karena kepentingan kami untuk menyoroti akuntabilitas negara, kami mencatat informasi mengenai situasi hak asasi manusia di dunia secara khusus, sesuai dengan pembagian negara yang bertanggung jawab atas situasi hak asasi manusia di teritori mereka.

Pertama kali diterbitkan tahun 2025
oleh Amnesty International Ltd
Peter Benenson House, 1, Easton Street,
London WC1X 0DW United Kingdom
© Amnesty International 2023
POL 10/8515/2025
ISBN:º978-0-86210-510-5
Bahasa asli: Bahasa Inggris

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan dibawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Untuk informasi lebih lanjut sila kunjungi laman perizinan kami di:
www.amnesty.org.

Laporan ini mendokumentasikan kerja dan kekhawatiran Amnesty International sepanjang tahun 2024 sekaligus analisis global mengenai tantangan terhadap hak asasi manusia yang sedang berlangsung. Laporan ini meliputi situasi hak asasi manusia yang dimonitor Amnesty Internasional selama 2024 di berbagai negara dan teritori.

Ketiadaan gambaran situasi sebuah negara atau teritori dalam laporan ini tidak menyiratkan nihilnya pelanggaran hak asasi manusia yang juga menjadi kekhawatiran Amnesty International. Begitu pula panjang tidaknya gambaran situasi sebuah negara di laporan ini sebagai dasar perbandingan kedalaman fokus Amnesty International di sebuah negara. Laporan ini tidak membahas secara panjang mengenai penggunaan vonis hukuman mati di mana Amnesty Internasional mencakupkan dokumentasinya dalam laporan mengenai penggunaan hukuman mati dan eksekusi mati global.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **6**

ANALISIS GLOBAL **10**

PELANGGARAN KONFLIK BERSENJATA 10

REPRESI TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT 12

DISKRIMINASI 13

KETIDAKADILAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN 15

TEKNOLOGI DAN HAK ASASI MANUSIA 17

GAMBARAN KAWASAN ASIA PASIFIK **19**

KEBEBASAN BEREKSPRESI 19

KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT 20

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG SEHAT 21

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG, SERTA PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK LAINNYA 21

IMPUNITAS DAN HAK ATAS KEBENARAN, KEADILAN, DAN REPARASI 22

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 23

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 23

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN 23

HAK-HAK KELOMPOK RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS 24

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT, DAN DISKRIMINASI BERBASIS ETNIS DAN KETURUNAN 24

HAK PENGUNGSI DAN MIGRAN 25

HUKUMAN MATI 25

INDONESIA **27**

KATA PENGANTAR

Dunia sedang dalam satu titik bersejarah. Kekuatan besar yang belum pernah hadir sebelumnya sedang mengincar cita-cita hak asasi manusia untuk semua orang, berusaha menghancurkan sistem internasional yang dibentuk oleh darah dan duka dari Perang Dunia Dua dan Holocaust. Perang suci yang bersifat relijius, rasial dan patriarkis yang bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang didasarkan pada ketidaksetaraan yang lebih besar diantara dan di dalam negara, membahayakan kesetaraan, keadilan, dan martabat yang telah dicapai dengan susah payah selama 80 tahun terakhir.

Berbagai serangan - terhadap akuntabilitas hak asasi manusia, terhadap hukum internasional, dan terhadap PBB - telah menjadi beberapa ciri khas dari 100 hari pertama "pemerintahan" Presiden AS Donald Trump pada tahun 2025.

Namun, serangan yang gegabah dan mengancam tersebut, yang bertentangan dengan upaya untuk mengakhiri kemiskinan global dan menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis ras dan gender yang telah berlangsung lama, tidak dimulai tahun ini. Garis merah tidak berubah menjadi hijau dalam semalam.

Sejak pelantikannya yang kedua, tindakan Presiden Trump telah melaju ke arah yang telah diperingatkan oleh Amnesty International dan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya - peringatan kami tidak dihiraukan, himbauan kami tidak digubris. Tindakannya terus berlanjut, dan merupakan hasil dari keputusan sistemik, disengaja, dan selektif yang diambil selama satu dekade terakhir, namun mencapai tingkat yang lebih dalam pada tahun 2025.

Jangan salah. Ini bukan hanya tentang Presiden Trump. Akarnya jauh lebih dalam. Dan, kecuali ada perlawanan yang kompak dan berani, titik bersejarah ini akan berubah menjadi transformasi bersejarah: bukan hanya era perubahan tetapi juga perubahan era.

MIMPI BURUK YANG DIMULAI DENGAN PERLAHAN

Selama lebih dari satu dekade, dunia telah menyaksikan penyebaran yang terus berlajut dari otoritarianisme dalam hukum, kebijakan dan praktik, ruang sipil yang menyempit, dan berkurangnya ruang kebebasan berekspresi dan berserikat. Berbagai kebijakan telah memperburuk ketidaksetaraan, meningkatkan kemiskinan, dan memperkaya para miliarder. Pandemi Covid telah memperlihatkan keserakahan, rasisme, dan keegoisan negara-negara kuat yang siap membiarkan jutaan orang meninggal. Dan dihadapkan pada krisis iklim, sebagian besar negara gagal memenuhi janji-janji mereka yang dibuat di Paris pada tahun 2015.

Dengan beberapa sinyal lampu merah yang menunjukkan peringatan kritis, pada tahun 2024, genosida pun terjadi.

2024: GENOSIDA YANG DISIARKAN SECARA LANGSUNG

Sejak 7 Oktober 2023 - ketika Hamas melakukan kejahatan mengerikan terhadap warga Israel dan lainnya serta menangkap lebih dari 250 sandera - dunia telah menjadi penonton genosida yang disiarkan secara langsung. Negara-negara melihat dengan ketidakberdayaan, ketika Israel membunuh ribuan orang Palestina, memusnahkan seluruh keluarga multigenerasi, menghancurkan rumah, mata pencaharian, rumah sakit, dan sekolah.

Tahun 2024 akan dikenang sebagai tahun di mana okupasi militer Israel semakin menjadi-jadi dan mematikan, karena dukungan Amerika Serikat, Jerman, dan sejumlah negara Eropa lainnya terhadap Israel; cara Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Biden, berulang kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan melanjutkan transfer senjata ke Israel.

Pada tahun 2024, Israel dan sekutu-sekutunya yang kuat, yang salah satunya adalah Amerika Serikat, mengklaim bahwa dan/atau bertindak seolah-olah hukum internasional tidak berlaku bagi mereka, dengan sengaja mengabaikan perintah Mahkamah Internasional dan dakwaan Mahkamah Pidana Internasional.

Pada tahun 2024, Presiden Vladimir Putin melanjutkan serangan sistematis terhadap infrastruktur sipil di Ukraina, menewaskan lebih banyak warga sipil dibandingkan tahun 2023. Dengan menghancurkan atau menduduki sebagian besar pembangkit listrik energi panas Ukraina, Rusia menyebabkan pemadaman listrik secara terus-menerus bagi ribuan orang. Rusia secara ilegal mengadili sejumlah tawanan perang Ukraina di Rusia dan di daerah-daerah Ukraina yang didudukinya.

Pada tahun 2024, ribuan warga Sudan mati akibat konflik dan kelaparan, di tengah krisis pengungsian paksa terbesar di dunia, disambut dengan ketidakpedulian global yang nyaris sama dengan kekerasan yang meningkat mematikan di Republik Demokratik Kongo, Burkina Faso, Niger, atau Myanmar. Peluang-peluang yang terkait dengan perdagangan senjata tidak dihiraukan, dan seruan-seruan untuk melakukan embargo senjata tidak digubris.

2024 memperlihatkan kemauan negara untuk menyebarkan propaganda terhadap pelayanan dari konflik bersenjata, diperkuat oleh argumen sosial media dan suara penguasa, dan tanpa memperhatikan keakuratan atau konsekuensi dari sebuah kebencian.

Singkatnya, tahun 2024 merendahkan martabat kita semua.

KEADILAN INTERNASIONAL DAN MULTILATERALISME

Namun, Afrika Selatan mengisyaratkan bahwa ada pilihan lain yang bisa dilakukan. Kasus Pengadilan Internasionalnya terhadap Israel yang diduga melanggar Konvensi Genosida merupakan langkah penting menuju keadilan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan kepala militer Hamas Mohammed Al-Masri atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan sebuah terobosan bersejarah.

Namun, negara-negara yang dengan penuh semangat mendukung ICC dalam penuntutannya terhadap Presiden Putin atas dugaan penculikan anak-anak Ukraina, memberikan tanggapan yang sangat berbeda terhadap Israel. Sejumlah senator AS mengancam Jaksa Penuntut ICC pada tahun 2024 dan Presiden Donald Trump kemudian memberikan sanksi kepada Jaksa Penuntut pada tahun 2025.

Waktu telah berlalu untuk menyayangkan standar ganda dari para arsitek sistem berbasis aturan pasca-Perang Dunia Kedua. Sebelum tahun 2024 berakhir, banyak negara secara aktif merusak lembaga-lembaga sistem tersebut dan bekerja melawan nilai-nilainya, yang menghasilkan situasi di mana hanya sedikit yang tersisa dari niat awalnya.

Presiden Trump hanyalah akselerator dari tren yang sudah berjalan dengan baik.

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MEDIA: IBARAT BURUNG KENARI DI TAMBANG BATU BARA

Pada tahun 2020, Amnesty International memperingatkan adanya kecenderungan otoriter yang muncul di berbagai negara. Kekhawatiran kami menjadi kenyataan. Pada tahun 2024, lebih banyak hukum dan praktik otoriter yang diadopsi. Serangan terhadap perbedaan pendapat politik meningkat, termasuk melalui penangkapan massal dan penghilangan paksa. Lebih banyak LSM dan partai politik yang dibubarkan secara paksa, dibekukan, atau ditargetkan secara sewenang-wenang sebagai “ekstremis”. Terdapat tanggapan yang tidak proporsional terhadap pembangkangan sipil dan kriminalisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap para pembela hak asasi manusia, aktivis iklim, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang mengekspresikan solidaritas terhadap warga Palestina; banyak dari mereka yang dicap sebagai “teroris”. Kelompok feminis dan pegiat hak-hak perempuan dan kelompok ragam gender dan seksualitas terus menghadapi serangan balik yang masif. Setidaknya 21 negara mengajukan undang-undang atau rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menekan kebebasan berbicara atau pelarangan terhadap media. Jumlah jurnalis yang terbunuh pada tahun 2024 mencapai titik tertinggi: menurut organisasi Komite Perlindungan Jurnalis (*the Committee to Protect Journalist*), setidaknya 124 jurnalis dan pekerja media terbunuh tahun lalu, hampir dua pertiga dari mereka adalah warga Palestina yang dibunuh oleh Israel.

“BOR, KAWAN, BOR” BERTEMU DENGAN “TERBAKAR, KAWAN, TERBAKAR”

Pada tahun 2024, tak ada satu pun wilayah yang luput dari krisis iklim. Gelombang panas ekstrem melanda Asia Selatan, disusul banjir besar yang berdampak pada jutaan orang dan memaksa ribuan lainnya mengungsi. Rekor kebakaran hutan di Amerika Selatan menghancurkan hutan hujan Amazon dan mengancam ekosistem di berbagai negara. Di Somalia, kekeringan dan banjir menghancurkan komunitas, melumpuhkan ekonomi lokal, serta memaksa keluarga dan komunitas berpindah tempat.

Tahun 2024 menandai kali pertama suhu rata-rata global dalam satu tahun kalender melampaui 1,5°C di atas rata-rata tahun 1850–1900.

Panas yang membakar menuntut aksi iklim yang lebih membara. Di atas kegagalan negara untuk menghapuskan penggunaan bahan bakar fosil, perundingan COP29 hanya menghasilkan kesepakatan

pembiayaan yang minim dan berisiko menjebak negara berpenghasilan rendah dalam lingkaran utang yang tak berujung.

Mantra Presiden Trump "bor, kawan, bor" hanyalah gema dari apa yang sudah berlangsung, dengan keputusannya pada 2025 untuk menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris disambut baik oleh negara-negara yang bergantung pada bahan bakar fosil.

Dan karena itu, di berbagai penjuru dunia, komunitas terus terbakar, tenggelam, dan binasa.

CAMPURAN MEMATIKAN BAGI JUTAAN ORANG

Pada 2024, Bank Dunia memperingatkan bahwa "pengurangan kemiskinan global hampir terhenti total dalam lima tahun terakhir, menimbulkan kekhawatiran bahwa dekade 2020–2030 akan menjadi dekade yang hilang", dalam laporannya yang berjudul *Poverty, Prosperity and Planet: Pathways out of the Polycrisis.*

Campuran mematikan dari kemiskinan buatan, konflik, represi politik, dan krisis iklim mengakibatkan perpindahan sekitar 110 juta orang pada tahun itu. Alih-alih mengatasi akar penyebabnya, banyak pemerintah dan gerakan politik justru memanfaatkan retorika rasis dan xenofobik untuk memicu kebencian. Mereka mengabaikan atau menyiasati perintah pengadilan, serta menggunakan tindakan ekstrem dan kekerasan untuk menolak kedatangan orang yang tidak resmi di perbatasan mereka.

KESETARAAN GENDER? SERANGAN TERHADAP HAK PEREMPUAN SERTA KELOMPOK RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS

Di Afghanistan, 50% populasi, yaitu perempuan dan anak perempuan, dihukum menjalani apa yang banyak disebut sebagai "kematian perlahan." Pemerintahan Taliban mengkriminalisasi eksistensi perempuan di ruang publik dengan menerapkan aturan "baik dan buruk" (*vice and virtue laws*), serta mencabut hak mereka atas pendidikan dan pekerjaan. Puluhan perempuan yang melakukan demonstrasi dilaporkan dihilangkan secara paksa atau ditahan sewenang-wenang.

Di Iran, hukum wajib berhijab yang baru memperparah represi terhadap perempuan dan anak perempuan, dengan hukuman cambuk, denda sangat besar, dan penjara berat. Para pejabat dan kelompok sipil yang menyerang perempuan karena melanggar aturan ini tetap kebal hukum.

Pelanggaran terhadap hak kelompok ragam gender dan seksualitas meningkat di banyak tempat. Dari Argentina hingga Rusia, pemerintah memperkenalkan kebijakan dan undang-undang yang membatasi akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Di AS, Meta dan TikTok menghapus beberapa informasi terkait aborsi dari internet. Kekerasan berbasis gender—termasuk femisida dan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata—dilaporkan meningkat di banyak wilayah.

AKHIR DARI SEBUAH ERA?

Negara-negara kuat menghina sejarah kita. Mereka bertindak seolah-olah pelajaran dari 1930-an dan 1940-an—dari Konvensi Genosida, Konvensi Jenewa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hingga Piagam PBB—bisa diabaikan dan dilupakan. Dengan terpilihnya Donald Trump dan kuatnya dominasi korporasi dalam pemerintahannya, kita dipaksa memasuki era brutal yang ditentukan oleh kekuatan militer dan ekonomi, bukan hak asasi dan diplomasi; oleh hierarki gender dan ras, serta cara berpikir menang-kalah; oleh nasionalisme nihilistik yang membentuk hubungan internasional.

LALU, BAGAIMANA KITA MERESPONS?

Pada 2024, semua 193 negara anggota Majelis Umum PBB sepakat untuk membuka jalan bagi perjanjian pertama tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Di tahun yang sama, mereka juga menyepakati Konvensi Kerangka tentang Kerja Sama Pajak Internasional untuk menghentikan penyalahgunaan sistem pajak global, sekaligus membuka sumber pendanaan penting bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Gambia menolak RUU untuk mencabut Undang-Undang Amandemen Perempuan 2015 yang melarang pemotongan genitalia Perempuan (*female genital mutilation).* Polandia mengadopsi definisi pemerkosaan berbasis persetujuan, menjadi negara Eropa ke-19 yang melakukannya. Parlemen Bulgaria menolak RUU untuk membuat daftar "agen asing" ala Rusia. Pengadilan Belgia mengakui tanggung jawab nasional atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama masa kolonial. Awal 2025, otoritas Filipina menyerahkan mantan Presiden Duterte ke ICC untuk menghadapi dakwaan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang narkotikanya yang mematikan.

Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk Masa Depan pada September 2024 memang memiliki keterbatasan, tetapi negara-negara bersepakat untuk menciptakan sistem internasional yang lebih adil: dengan representasi yang lebih luas di Dewan Keamanan (terutama bagi Afrika), reformasi arsitektur keuangan global, penyelesaian krisis utang, dan peningkatan dana pembangunan.

Yang paling penting, tahun pemilu—dengan 64 pemilihan umum di seluruh dunia pada 2024—tidak menghasilkan kemenangan mutlak bagi kekuatan anti-ham. Di banyak tempat, rakyat memilih jalan berbeda, menunjukkan bahwa kebangkitan otoritarianisme bukanlah keniscayaan, dan bisa dilawan.

Masa depan belum ditentukan, tapi dunia berada di persimpangan genting. Seratus hari setelah pemerintahan Trump dimulai, sebagian negara memang menunjukkan keberanian untuk menjawab tantangan, namun mayoritas tidak. Banyak yang pura-pura bahwa sang kaisar baru memang terhormat, banyak pula yang mengenakan "pakaian" yang sama dengan sang kaisar. Namun kenyataannya sangatlah berbeda: pembungkaman kritik, serangan terhadap kebebasan akademik, anggaran militer yang membengkak, penjarahan bantuan kemanusiaan, hingga balas dendam dagang—itulah pakaian sebenarnya dari dunia yang saat ini di tengah krisis mendalam.

Memang benar, kita harus memperbaiki kegagalan sistemik sistem internasional dalam menegakkan hak asasi. Tapi hari ini, kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang ingin membentuk sistem baru sepenuhnya—bukan yang lebih adil dan setara, melainkan yang tidak memiliki perlindungan HAM; bukan yang menjunjung supremasi hukum, melainkan yang mengutamakan keuntungan di atas keadilan.

Perlawanan terorganisir terhadap kekuatan ini bukan sekadar penting—melainkan satu-satunya jalan sah yang kita miliki. Seperti biasa, ketika negara gagal menegakkan HAM, para pembela hak dan aktivis komunitas bangkit. Mereka menolak rezim kekuasaan dan keuntungan yang mengancam martabat bersama kita. Mereka kembali menunjukkan bahwa masyarakat sipil adalah garis depan perlindungan atas hak dan kebebasan fundamental.

Melawan, kita harus. Melawan, kita akan.
Agnès Callamard
Sekretaris Jenderal
April 2025

ANALISIS GLOBAL

Penelitian Amnesty International pada tahun 2024 menyoroti beberapa tema utama yang membentuk tren hak asasi manusia global saat ini: pelanggaran hukum kemanusiaan internasional selama konflik bersenjata, penindasan terhadap perbedaan pendapat, diskriminasi, ketidakadilan ekonomi dan iklim, serta penyalahgunaan teknologi untuk melanggar hak asasi manusia. Terlepas dari beberapa perkembangan positif yang masih sangat terbatas, banyak dari tren tersebut menunjukkan kemunduran yang berisiko memburuk pada tahun 2025 dan seterusnya, karena negara-negara tersebut, terutama negara-negara kuat, terus merusak sistem berbasis aturan internasional dan praktik-praktik otoriter yang tersebar di berbagai benua.

PELANGGARAN KONFLIK BERSENJATA

Penduduk sipil menghadapi kejahatan perang di berbagai negara dan genosida di Gaza pada tahun 2024 dan masih terus berlanjut pada tahun 2025. Meskipun mekanisme peradilan internasional telah mengambil langkah penting menuju akuntabilitas dalam beberapa kasus, pemerintah yang berkuasa telah berulang kali menghalangi upaya-upaya untuk mengambil tindakan nyata guna mengakhiri pelanggaran.

KEJAHATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Konflik bersenjata telah menghancurkan kehidupan jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Etiopia, Irak, Israel, dan Wilayah Pendudukan Israel di Palestina (OPT), Libya, Mali, Mozambik, Myanmar, Niger, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Ukraina, dan Yaman. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk pasukan pemerintah maupun kelompok bersenjata telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti serangan langsung terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil serta serangan tanpa pandang bulu yang menewaskan dan melukai warga sipil.

Banyak masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan (marjinal), telah kehilangan hak-hak mereka atas pendidikan, makanan, air, tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan dan keamanan. Pada bulan Agustus 2024, PBB mengumumkan terjadinya kondisi kelaparan di kamp Zamzam untuk para pengungsi internal (*Internally Displaced People)* di Sudan. Dengan 11 juta pengungsi internal pada tahun 2024, Sudan menghadapi krisis pengungsian terbesar di dunia. Sementara Rusia terus menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di pusat-pusat populasi di Ukraina dengan rudal dan pesawat tak berawak, kondisi kehidupan dasar bagi warga sipil Ukraina anjlok, dengan anak-anak, orang tua, dan kelompok-kelompok berisiko lainnya membayar harga yang sangat tinggi. Rusia juga telah melakukan penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan kejam lainnya terhadap warga sipil dan tawanan perang Ukraina.

Tindakan Israel di Gaza telah membawa bencana besar bagi warga sipil Palestina dan tergolong sebagai genosida. Sementara itu, sistem apartheid dan pendudukan Israel yang melanggar hukum telah menjadi semakin kejam di Tepi Barat yang diduduki, ini terlihat dengan adanya peningkatan signifikan dalam penahanan sewenang-wenang, pembunuhan di luar hukum, dan serangan yang didukung negara oleh pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina.

Terdapat lonjakan yang mengkhawatirkan dalam kasus-kasus kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender terkait konflik di beberapa negara pada tahun 2024. Di Republik Afrika Tengah, lebih dari 11.000 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan pada paruh pertama tahun ini. Di Sudan, Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB untuk Sudan menemukan bahwa anggota Pasukan Bantuan Cepat (*Rapid Support Forces)* telah melakukan kekerasan seksual yang meluas.

Beberapa pelanggaran dalam situasi konflik bersenjata memiliki dampak yang tidak sepadan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di Gaza, beberapa gelombang pemindahan paksa telah berkontribusi pada kondisi yang tidak manusiawi bagi lebih dari satu juta warga Palestina, terutama bagi wanita hamil dan menyusui. Di timur laut Suriah, ribuan perempuan dan anak perempuan telah ditahan selama lebih dari lima tahun tanpa dakwaan atau pengadilan di kamp-kamp atau fasilitas penahanan karena kerabat laki-laki mereka dicurigai berafiliasi dengan kelompok bersenjata ISIS.

Rasisme sistemik juga telah memicu konflik. Di Israel, para pemimpin politik telah menggunakan retorika yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina. Di Myanmar, Rohingya terus menghadapi serangan rasis, yang menyebabkan banyak dari mereka harus melarikan diri dari tanah airnya di Negara Bagian Rakhine. Di Sudan, beberapa serangan Pasukan Bantuan Cepat terhadap warga sipil dimotivasi oleh faktor etnis. Sementara itu,

Rusia telah berusaha mengubah demografi wilayah Ukraina yang telah didudukinya dan menekan bahasa dan budaya lokal Ukraina dan lainnya.

Jutaan orang di seluruh dunia telah memprotes kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Namun, lembaga-lembaga multilateral, terutama Dewan Keamanan PBB, sering kali tidak mampu atau tidak mau menekan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional atau memastikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan skala kebutuhan warga sipil. Akibatnya, lembaga-lembaga ini kehilangan legitimasi, dan keberlangsungannya dipertanyakan.

Sepanjang tahun 2024, pemerintah secara individu dan multilateral berulang kali gagal mengambil tindakan yang berarti untuk mengakhiri kekejaman. Amerika Serikat (AS), Inggris, dan banyak negara Uni Eropa secara terbuka mendukung tindakan Israel di Gaza. AS menyalahgunakan hak vetonya, yang mengakibatkan Dewan Keamanan PBB selama berbulan-bulan tidak dapat mengambil tindakan efektif apa pun, dan hanya menyerukan gencatan senjata segera namun terbatas pada 25 Maret 2024. Bahkan AS turut melemahkan Dewan Keamanan dengan menyatakan bahwa resolusi tersebut tidak mengikat, sebagai upaya untuk melindungi sekutunya agar tidak mematuhi resolusi tersebut. Tindakan yang lebih kuat diambil oleh Majelis Umum PBB, yang mengadopsi sebuah resolusi pada bulan September 2024 untuk menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas Palestina dalam waktu 12 bulan. Pada bulan Oktober 2024, dua resolusi lainnya ditetapkan untuk menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan semua sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan ke dalam dan di seluruh Gaza, serta menegaskan kembali dukungan penuh bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Pada November 2024, Rusia mengajukan veto atas resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut diakhirinya serangan terhadap warga sipil di Sudan dan menyerukan fasilitasi bantuan kemanusiaan bagi jutaan orang yang sangat membutuhkan di sana.

Pemerintah harus mereformasi Dewan Keamanan PBB sehingga anggota tetap tidak dapat menggunakan hak veto mereka untuk memblokir tindakan yang bertujuan mengakhiri dan memperbaiki kejahatan kekejaman. Mereka juga harus meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang membutuhkan.

AKUNTABILITAS

Meskipun tindakannya tidak memadai di beberapa negara, seperti Afghanistan dan Nigeria, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengambil langkah-langkah penting menuju akuntabilitas di Israel dan Wilayah Pendudukan Israekl di Palestina, serta Libya dan Myanmar. Pada bulan Oktober 2024, ICC mengumumkan surat perintah penangkapan terhadap enam pemimpin, anggota senior, dan afiliasi kelompok bersenjata al-Kaniat di Libya atas kejahatan perang. Pada bulan November 2024, Jaksa Penuntut ICC meminta surat perintah penangkapan untuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing atas kejahatan terhadap kemanusiaan kepada masyarakat Rohingya selama operasi militer pada tahun 2017. Pada bulan yang sama, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel dan Hamas atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Beberapa negara mengklarifikasi bahwa mereka akan menegakkan surat perintah penangkapan ICC terhadap para pejabat Israel. Namun, sejumlah sekutu Israel telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Demikian pula, Mongolia gagal memenuhi kewajibannya sebagai pihak dalam Statuta Roma untuk menangkap Presiden Rusia, Vladimir Putin, berdasarkan surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan oleh ICC atas dugaan kejahatan perang pada Maret 2023, ketika ia mengunjungi negara tersebut pada September 2024.

Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional mengeluarkan tiga rangkaian tindakan sementara dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di bawah Konvensi Genosida dan mengeluarkan pendapat penasihat yang menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah tindakan yang melanggar hukum. Beberapa negara, termasuk Belgia dan Spanyol, telah memenuhi seruan para ahli PBB untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel. Proses pengadilan oleh para pelaku masyarakat sipil telah menentang transaksi senjata di negara-negara seperti Denmark, Perancis, Belanda dan Inggris. Amerika Serikat sejauh ini masih menjadi pengekspor senjata terbesar ke Israel, dan beberapa negara Eropa, termasuk Republik Ceko, Perancis dan Jerman, terus mentransfer senjata ke negara-negara yang tidak memiliki akuntabilitas atas pelanggaran di masa lalu dan memiliki risiko besar senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius, termasuk Israel, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Pemerintah harus mendukung dan melindungi staff ICC dari sanksi dan ancaman lainnya, serta dalam menjalankan kewenangannya. Mereka juga harus menghentikan transaksi senjata yang tidak bertanggung jawab.

REPRESI TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT

Pihak berwenang di berbagai negara telah menerapkan praktik-praktik otoriter dan memperkenalkan langkah-langkah baru untuk membatasi kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai. Mereka telah mempergunakan undang-undang dan peraturan yang ada untuk menindas para pembela HAM, pengkritik dan penentang, atau sebagai cara untuk menghindari pertanggungjawaban dan melanggengkan kekuasaan.

KEBEBASAN BERKUMPUL

Pada tahun 2024, peraturan baru yang membatasi hak untuk memprotes telah disetujui dan diusulkan di Argentina, Georgia, Nikaragua, Pakistan, dan Peru. Di beberapa negara, termasuk Turki, pihak berwenang telah memberlakukan larangan protes secara menyeluruh.

Pasukan keamanan sering kali secara brutal dan mematikan membubarkan aksi protes, serta menggunakan penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa untuk menekan massa aksi. Pada tahun 2024, pembunuhan dan penangkapan massal terhadap sejumlah pengunjuk rasa didokumentasikan di berbagai negara termasuk Bangladesh, Mesir, Georgia, Guinea, India, Indonesia, Yordania, Kenya, Mozambik, Nepal, Nigeria, Pakistan, dan Senegal. Di Bangladesh, angkatan bersenjata dikerahkan untuk melawan protes mahasiswa dan mengeluarkan perintah "tembak di tempat," yang mengakibatkan hampir seribu orang tewas dan lebih banyak lagi yang terluka.

Di seluruh dunia, termasuk di Kanada, Mesir, Fiji, Finlandia, Jerman, India, Italia, Malaysia, Maladewa, dan Amerika Serikat, para pembela hak-hak Palestina mengalami kekerasan, pelecehan, dan penangkapan.

Penggunaan senjata mematikan dan senjata yang kurang mematikan (*less-lethal weapons)* terhadap para pengunjuk rasa terus menyebabkan kematian dan cedera di seluruh dunia. Kendati demikian, kampanye masyarakat sipil global untuk Perjanjian Perdagangan Bebas Penyiksaan yang mengikat secara hukum telah mengembangkan jangkauan globalnya, dengan menarik perhatian negara-negara terhadap kebutuhan akan perjanjian dan mendapatkan dukungan vokal dari sejumlah Prosedur Khusus PBB.

Dalam langkah positif, pada bulan Juli 2024, Pengadilan ECOWAS memutuskan bahwa Nigeria telah melanggar hak-hak pengunjuk rasa #EndSARS. Pada bulan Mei, kebijakan di Inggris yang mengatur peningkatan wewenang polisi untuk membatasi protes telah dibatalkan karena dianggap melanggar hukum. Saat presiden Korea Selatan menangguhkan hak-hak dasar, termasuk hak untuk berkumpul secara damai, setelah deklarasi darurat militer pada bulan Desember 2024, aksi protes yang dilakukan rakyat berhasil menentang langkah tersebut. Majelis Nasional dengan cepat membalikkan keputusan tersebut dan memberhentikan presiden dari jabatannya.

Pemerintah harus menghentikan penggunaan senjata yang mematikan dan yang kurang mematikan terhadap para pengunjuk rasa dan meningkatkan upaya-upaya untuk merundingkan dan mengadopsi Perjanjian Perdagangan Bebas Penyiksaan PBB.

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERSERIKAT

Pada tahun 2024, pihak berwenang memperkenalkan atau berupaya memperkenalkan pembatasan baru pada hak atas kebebasan berekspresi. Negara-negara termasuk Afghanistan, Bangladesh, Belarusia, Burkina Faso, Cina (termasuk Hong Kong), Guinea Khatulistiwa, Gambia, Georgia, Jerman, India, Kirgistan, Lesotho, Moldova, Pakistan, Papua Nugini, Rusia, Sri Lanka, Tajikistan, Uzbekistan, dan Vietnam mengajukan undang-undang atau rancangan undang-undang yang beresiko memberangus kebebasan berpendapat dan membredel media.

Pihak berwenang di Côte d'Ivoire, Ethiopia, Georgia, Guinea, Hongaria, Kyrgyzstan, Nikaragua, Paraguay, Rusia, Rwanda, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Uganda, dan Venezuela, serta beberapa negara lainnya, mengambil langkah-langkah baru untuk membatasi kebebasan berserikat. Tindakan tersebut termasuk membubarkan atau membekukan Lembaga Masyarakat Sipil (LSM) dan partai politik, serta memberi label "ekstremis" pada mereka.

Secara lebih luas, serangan yang merajalela terhadap hak-hak kebebasan berekspresi dan berserikat terus berlanjut. Taktik represif pemerintah termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penuntutan yang tidak adil terhadap para pengkritik dan penentang, serta penyebaran alat mata-mata. Dalam beberapa kasus, mereka telah membunuh atau menghilangkan paksa para pengkritik secara tidak sah dan menjatuhkan hukuman mati. Di antara mereka yang menjadi sasaran adalah jurnalis, komentator online, aktivis politik dan serikat buruh, serta pembela hak asasi manusia, termasuk pegiat hak-hak perempuan, kelompok ragam gender dan seksualitas dan masyarakat yang terpinggirkan. Pada tahun 2024, di beberapa negara seperti Belarus, Tiongkok, Kirgistan, Rusia, Arab Saudi, Tajikistan, dan Turki, individu-individu dihukum dan dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan terkait "terorisme" atau "ekstremisme", setelah melalui proses peradilan

yang tidak adil, semata-mata karena menggunakan hak-hak mereka untuk berekspresi dan berserikat, termasuk di media sosial.

Pemerintah harus mencabut undang-undang dan mengakhiri praktik-praktik yang melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan berserikat.

DISKRIMINASI

Diskriminasi rasial dan bentuk diskriminasi lainnya telah mendorong pendekatan banyak negara terhadap suaka dan migrasi serta mempengaruhi hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Sementara itu, kelompok-kelompok yang terpinggirkan telah dikambinghitamkan dan ditampilkan sebagai ancaman terhadap stabilitas politik atau ekonomi untuk melegitimasi pembatasan lebih lanjut terhadap hak asasi manusia dan memungkinkan mereka yang berkuasa untuk memperkuat kontrol. Pada tahun 2024, terdapat kemajuan dan kemunduran dalam ranah hak-hak kelompok ragam gender dan seksualitas dan hak-hak seksual dan reproduksi.

HAK-HAK PENGUNGSI DAN MIGRAN

Rasisme dan bentuk-bentuk penindasan lainnya terus mendorong pendekatan banyak negara terhadap suaka dan migrasi. Kebijakan dan praktik diskriminatif secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok-kelompok migran, pengungsi, dan non-warga negara lainnya.[1] Kanada, Qatar, dan Arab Saudi terus memberlakukan skema visa yang berpijak pada logika rasis dan membatasi pekerja migran pada satu majikan, sehingga membuka ruang luas bagi eksploitasi tenaga kerja. Di saat yang sama, negara dan aktor non-negara aktif menggunakan dan kerap menyalahgunakan teknologi digital secara represif dalam mengelola migrasi dan sistem suaka.[2]

Pemerintah di berbagai belahan dunia terus mengambil langkah ekstrem dan keras untuk mencegah serta mendorong kembali kedatangan migran yang dianggap tidak teratur. Tindakan ini mencakup pengalihan tanggung jawab terhadap pengungsi dan migran ke negara lain, penutupan perbatasan, hingga pemulangan massal secara paksa. Pada tahun 2024, otoritas Mesir secara sewenang-wenang menahan ratusan pengungsi asal Sudan sebelum memulangkan mereka secara paksa ke negara asal; mereka termasuk di antara lebih dari 3,2 juta pengungsi Sudan yang tersebar di negara-negara tetangga, sering kali hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di Pakistan, pemerintah memaksa ratusan ribu pengungsi kembali ke Afghanistan melalui kebijakan deportasi yang melanggar hukum. Di perbatasan Amerika Serikat–Meksiko, pemerintah AS menangguhkan akses masuk bagi para pencari suaka, membuat mereka semakin rentan terhadap pemerasan, penculikan, serta kekerasan seksual dan berbasis gender. Sementara itu, Belarus terus mendorong para pengungsi dan migran melintasi perbatasannya menuju Uni Eropa, sebuah praktik berbahaya yang telah merenggut nyawa. Negara-negara Eropa lainnya, bersama Uni Eropa, masih gagal mengurangi ketergantungan pada negara ketiga dalam pengelolaan migrasi dan belum menunjukkan kemauan politik untuk memperluas jalur aman dan legal bagi para pengungsi.

Respons keras sejumlah pemerintah terhadap migrasi ireguler turut melemahkan prinsip-prinsip supremasi hukum. Banyak pemerintah mengabaikan atau sengaja menghindari putusan pengadilan yang seharusnya melindungi hak-hak dasar migran, pencari suaka, dan pengungsi. Di Yunani, otoritas secara konsisten mengacuhkan putusan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR). Salah satunya terkait penggunaan senjata api oleh penjaga pantai dalam operasi penjagaan perbatasan, meski ECtHR telah menyatakan bahwa Yunani melanggar hak untuk hidup dalam insiden pencegatan di laut pada 2014, praktik tersebut tetap berlangsung hingga kini. Di Inggris, pemerintah berusaha membatalkan keputusan Mahkamah Agung tahun 2023 yang menyatakan bahwa Rwanda bukanlah negara yang aman untuk pemindahan pencari suaka. Upaya ini akhirnya gagal setelah terjadi pergantian pemerintahan pada 2024.

Di tengah kebijakan yang kian menutup akses dan mengabaikan hak asasi, sejumlah kelompok warga sipil di berbagai negara justru mengambil langkah sebaliknya. Lewat solidaritas nyata seperti menyediakan tempat tinggal, akses layanan dasar, dan pendampingan sosial mereka menunjukkan bahwa kemanusiaan masih bisa hidup di tengah sistem yang semakin kejam terhadap pengungsi dan migran.

Pemerintah harus mengadopsi kebijakan migrasi yang secara efektif mengatasi ketidaksetaraan dan pengucilan.

DISKRIMINASI RASIAL

Kelompok rasial, etnis, minoritas, dan kelompok terpinggirkan lainnya terus menghadapi diskriminasi sistemik dan ketidaksetaraan yang mengakar, yang sangat mempengaruhi hak asasi mereka.

Pada tahun 2024, dalam sebuah langkah positif, Masyarakat Adat di Taiwan memenangkan hak untuk menggunakan nama asli mereka, bukan versi bahasa Mandarin, dalam dokumen resmi. Namun, penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat mengalami kemunduran di beberapa negara. Pemerintah Selandia Baru memberlakukan undang-undang baru yang melemahkan hak-hak suku Māori. Pemerintah di beberapa negara termasuk Bolivia, Indonesia dan Malaysia melanjutkan proyek-proyek ekstraktif atau pembangunan di atas tanah yang diklaim oleh Masyarakat Adat tanpa persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan.

Pembuatan profil rasial dan rasisme yang dilembagakan di bidang-bidang seperti penegakan hukum dan kesejahteraan masih terus berlanjut, yang menyoroti sifat meluasnya ketidakadilan ini. Di Amerika, tindakan penegakan hukum telah menyasar, atau secara tidak proporsional mempengaruhi, keturunan Afrika di negara-negara termasuk Brasil, Ekuador dan Amerika Serikat. Di Asia, minoritas etnis dan agama seperti kelompok etnis non-Han di Cina dan minoritas Pamiri di Tajikistan telah menghadapi penganiayaan dan diskriminasi sistemik. Di Eropa, Norwegia dan Swiss telah menggunakan profil rasial yang diskriminatif, sementara di Denmark, Belanda, dan Swedia, sistem kesejahteraan otomatis telah menyebabkan praktik-praktik diskriminatif terhadap orang-orang yang memiliki ras tertentu, serta perempuan dan individu berpenghasilan rendah.

Di Inggris dan negara-negara lain, amplifikasi oleh platform media sosial atas konten berbahaya berperan dalam kekerasan rasis dan xenofobia.

Para ahli, aktivis, dan organisasi yang bekerja pada warisan kolonialisme terus menyerukan kepada pemerintah untuk menangani masa lalu kolonial mereka dan dampak yang sedang berlangsung pada hak asasi manusia. Pada bulan Agustus, Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika mengakui bahwa rasisme struktural dan diskriminasi rasial menjadi penghalang bagi pemenuhan hak-hak masyarakat keturunan Afrika dan komunitas suku, serta menyerukan kepada negara-negara untuk mengimplementasikan keadilan reparatori yang komprehensif. Pada bulan November, para ahli dari benua Afrika dan diaspora globalnya menyerukan kepada pemerintah-pemerintah Eropa untuk menangani masa lalu kolonial mereka dan dampak yang sedang berlangsung pada Konferensi Dekoloniale Berlin Afrika, sebuah versi tandingan dekolonial dari Konferensi Berlin Afrika 1884-1885 yang diadakan 140 tahun sebelumnya.[3]

Pemerintah harus mengakhiri diskriminasi rasial yang tertanam dalam hukum dan praktik, menjawab pertanyaan tentang keadilan reparatif untuk perbudakan dan kolonialisme, serta menantang warisan ketidakadilan historis ini dalam bentuk-bentuk rasisme dan ketidaksetaraan kontemporer.

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER

Penolakan terhadap kesetaraan gender semakin menguat di berbagai konteks. Kekerasan dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan, anak perempuan, dan kelompok ragam gender dan seksualitas terus berlangsung, terutama bagi mereka yang menghadapi berbagai bentuk penindasan yang saling bertumpuk. Di Afghanistan, perempuan dan anak perempuan tetap menjadi sasaran kekerasan berbasis gender yang sistematis, sebuah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada 2024, Taliban memperketat pembatasan yang secara efektif menghapus mereka dari ruang publik dan membatasi hampir seluruh aspek kehidupan mereka. Di Argentina, pembunuhan terhadap perempuan, atau femisida terjadi setiap 33 jam sepanjang tahun 2024. Sementara itu, di Iran, pemerintah meningkatkan represi brutal terhadap perempuan dan anak perempuan yang menolak kewajiban mengenakan jilbab.

Meski situasi global menunjukkan banyak kemunduran, beberapa perkembangan positif tetap terjadi. Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengesahkan kesetaraan pernikahan bagi pasangan kelompok ragam gender dan seksualitas. Di Jepang, pengadilan memutuskan bahwa larangan terhadap pernikahan sesama jenis tidak konstitusional. Pernikahan sesama jenis juga dilegalkan di Yunani dan Republik Ceko. Pengadilan di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan turut mencatat kemajuan dalam pengakuan hak-hak transgender, terutama terkait prosedur penegasan gender. Di Namibia, Pengadilan Tinggi membatalkan undang-undang yang melarang hubungan seksual sesama jenis atas dasar suka sama suka meskipun pemerintah kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.

Namun di saat yang sama, serangan terhadap hak-hak kelompok ragam gender dan seksualitas terus berlanjut. Diskriminasi dan kebijakan represif makin menguat, didorong oleh gerakan anti-hak asasi manusia dan ideologi anti-gender yang semakin terorganisir.[4] Di Ghana, Malawi, Mali, dan Uganda, otoritas legislatif maupun yudikatif mengambil langkah untuk mengkriminalisasi atau mempertahankan pelarangan terhadap hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan secara suka sama suka di antara orang dewasa. Di Georgia, pemerintah mengesahkan undang-undang tentang "nilai-nilai keluarga dan perlindungan anak," yang memuat berbagai ketentuan homofobik dan transfobik—banyak di antaranya meniru pendekatan represif dari undang-undang "propaganda gay" di Rusia. Bulgaria turut memperketat pembatasan dengan melarang "propaganda terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas" di lingkungan sekolah. Kekerasan dan penolakan atas

perlindungan hak asasi manusia berdampak besar terhadap kelompok transgender di berbagai belahan dunia, yang kerap menjadi sasaran utama kebijakan diskriminatif dan kekerasan sosial.

Di tengah tren pembatasan, sejumlah negara pada 2024 memperkenalkan kebijakan yang memperluas akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Prancis mencatat tonggak sejarah dengan menjadi negara pertama yang secara eksplisit menjamin akses terhadap aborsi dalam konstitusinya. Beberapa negara Eropa lainnya juga mengesahkan langkah-langkah perlindungan terhadap pasien dan penyedia layanan kesehatan dari intimidasi di sekitar klinik aborsi. Namun, kemunduran tetap terjadi. Afghanistan, Argentina, Chile, Puerto Rico, dan Rusia memperkenalkan kebijakan, baik melalui hukum maupun praktik administratif yang justru mempersempit akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Di ranah digital, perusahaan media sosial seperti Meta dan TikTok turut berkontribusi dalam membatasi akses informasi dengan menghapus konten seputar aborsi secara online.

Hambatan terhadap layanan aborsi masih meluas di banyak negara. Mereka yang membela hak atas aborsi—termasuk aktivis, advokat, tenaga kesehatan, dan pendukung lainnya—terus menghadapi tekanan. Banyak dari mereka mengalami stigmatisasi, ancaman, bahkan dikriminalisasi melalui penangkapan, investigasi, dan penuntutan yang tidak adil.

Pemerintah harus mengakhiri diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, mencabut undang-undang yang represif dan memastikan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, termasuk aborsi yang aman.

KETIDAKADILAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Pemerintah telah gagal menunjukkan ambisi yang diperlukan untuk mengatasi biaya hak asasi manusia yang terus meningkat akibat perubahan iklim. Sementara itu, tingkat inflasi yang tinggi, pembayaran utang dan penyalahgunaan pajak telah menggerogoti hak-hak ekonomi dan sosial di semua negara di semua tingkat pendapatan, terutama di negara-negara dengan tingkat pendapatan terendah. Selain itu, dalam konteks transisi menuju energi terbarukan, permintaan akan apa yang disebut "mineral kritikal" telah meningkat secara signifikan, sehingga menimbulkan risiko hak asasi manusia yang baru.

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG SEHAT

Pemerintah di berbagai negara gagal menjalankan kewajiban mereka untuk melindungi hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun lintas batas, dalam merespons krisis iklim yang terus memburuk. Program Lingkungan PBB (UNEP) melaporkan bahwa dunia berada di jalur menuju pemanasan global sekitar 3 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini—jauh melampaui batas aman yang disepakati secara global. Pada Mei 2024, data menunjukkan bahwa suhu rata-rata global selama 12 bulan sebelumnya telah melampaui 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat pra-industri, mempertegas urgensi krisis yang kini berlangsung secara nyata, bukan sekadar proyeksi masa depan.[5]

Tahun 2024 menunjukkan bahwa bahkan pada tingkat pemanasan saat ini, dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia sudah sangat besar. Perubahan iklim memperparah bencana alam seperti badai, angin topan, kebakaran hutan, dan hujan ekstrem yang kini terjadi lebih sering dan lebih intens dari sebelumnya. Dampaknya mencakup peningkatan angka kematian, pengungsian paksa, kelaparan, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Di Asia Selatan, banjir besar di Bangladesh dan India memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Sementara itu, di Afrika, krisis iklim mendorong semakin banyak orang mengungsi—menambah jutaan orang yang telah terdampak sebelumnya.[6]

Beberapa pemerintah telah memilih untuk menumbuhkan ekonomi mereka melalui investasi di sektor-sektor ekonomi dan proyek-proyek yang merugikan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan yang sehat. Investasi semacam itu sering kali tidak diatur dengan baik dan mendorong para pelaku korporasi untuk memaksimalkan keuntungan mereka tanpa menghiraukan "jaminan" kerusakan hak asasi manusia. Sebagai contoh, pemerintah telah memberikan subsidi yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didanai oleh pembayar pajak kepada industri bahan bakar fosil, terlepas dari tanggung jawabnya terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan di seluruh dunia; dalam solusi yang belum terbukti untuk krisis iklim yang mungkin memerlukan pelanggaran hak asasi manusia dalam implementasinya, seperti penangkapan dan penyimpanan karbon serta produksi hidrogen; dan dalam proyek-proyek pariwisata berskala besar. Dalam beberapa kasus, proyek-proyek ini menyebabkan penggusuran paksa, polusi yang signifikan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Negara-negara yang menghasilkan emisi karbon paling banyak hanya menyumbangkan sedikit sekali pendanaan iklim untuk adaptasi di negara-negara berpenghasilan rendah yang berada di garis depan bahaya iklim. Adaptasi iklim dapat membantu meminimalisir kematian dan kerugian hak asasi manusia lainnya, melalui

penerapan sistem peringatan dini yang kuat, sistem kesehatan yang tangguh, dan infrastruktur tanggap darurat. Beberapa pendanaan bergantung pada pinjaman yang semakin menambah utang bagi negara-negara berpenghasilan rendah.

Para aktivis dan masyarakat telah menuntut keadilan iklim. Beberapa telah menggunakan mekanisme peradilan domestik atau internasional untuk memaksa pemerintah berkomitmen pada penghapusan bahan bakar fosil yang lebih cepat, meskipun pemerintah tidak selalu menerapkan keputusan yang dihasilkan. Tiga keputusan yang dikeluarkan oleh ECtHR pada bulan April 2024 memperjelas kewajiban hak asasi manusia negara dalam konteks krisis iklim.[7] Salah satunya memutuskan bahwa Swiss telah gagal memenuhi kewajibannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi parlemen Swiss memilih untuk menolaknya. Sementara itu, Mahkamah Internasional memulai sidang untuk meminta pendapat penasihat tentang perubahan iklim yang diprakarsai oleh upaya-upaya yang dipimpin oleh para mahasiswa di negara kepulauan Pasifik, Vanuatu.

Semua pemerintah harus menerapkan penghapusan bahan bakar fosil secara cepat, adil, dan didanai serta menghentikan subsidi industri bahan bakar fosil. Negara-negara penghasil emisi historis dan negara-negara lain yang memiliki kemampuan untuk melakukannya harus menyediakan dana hibah untuk adaptasi iklim di negara-negara berpenghasilan rendah yang paling dirugikan oleh perubahan iklim.[8]

HAK-HAK EKONOMI DAN SOSIAL

Perubahan iklim yang memburuk telah dilatarbelakangi oleh konflik global, inflasi yang tinggi dan pembayaran utang, peraturan perusahaan yang buruk dan penyalahgunaan pajak yang merajalela.[9] Pada tahun 2024, pembayaran utang negara-negara berpenghasilan rendah mencapai tingkat tertinggi dalam 30 tahun terakhir, sehingga mengerdilkan anggaran kesehatan dan pendidikan di banyak negara. Sistem pajak yang tidak adil dan kegagalan untuk mengendalikan penghindaran dan penghindaran pajak perusahaan dan individu semakin membuat pemerintah kehilangan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk merealisasikan hak-hak. Akibatnya, kemiskinan dan ketidaksetaraan yang ekstrem terus meningkat. Kemiskinan dan konflik, ditambah dengan kekeringan akibat perubahan iklim dan bencana alam lainnya, menyebabkan ratusan juta orang mengalami kerawanan pangan yang parah. Pada tahun 2024, kelaparan diumumkan di Gaza, Haiti, dan Sudan. Secara global, tanggapan kemanusiaan hanya menyediakan kurang dari setengah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Menanggapi situasi ini, para aktivis dan masyarakat melakukan protes dan pembangkangan sipil untuk mengekspresikan keprihatinan akan biaya hidup, bahkan di tengah meningkatnya kriminalisasi terhadap aksi protes. Selain itu, pada tahun 2024, kerangka acuan untuk menyusun Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Kerja Sama Pajak Internasional telah diadopsi. Konvensi ini memiliki potensi untuk meletakkan dasar bagi sistem pajak global yang lebih adil yang mencegah penyalahgunaan yang melemahkan kapasitas pemerintah untuk berinvestasi dalam hak-hak atas kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Sebanyak 110 negara memberikan suara setuju, dengan hanya delapan negara yang memberikan suara tidak setuju dan 44 negara abstain.

Pemerintah harus bergerak cepat untuk menyusun, mengadopsi, dan menerapkan konvensi pajak PBB, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan pajak untuk sementara.

AKUNTABILITAS PERUSAHAAN

Upaya aktor-aktor perusahaan untuk mempengaruhi peraturan dan kebijakan, lemahnya regulasi pemerintah dan kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia telah melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia seperti mencemari sumber air minum, tempat pemancingan, ladang dan udara di sekitar kelompok masyarakat dan menginjak-injak hak atas informasi dan persetujuan.

Dalam hal transisi energi, permintaan atas “material kritikal” telah meningkat secara signifikan, yang berisiko melanggar hak asasi manusia. Perusahaan pembuat kendaraan listrik belum mendemonstrasikan komitmen mereka untuk memenuhi standar hak asasi manusia dan bahkan melaksanakan kebijakan mereka dalam aksi nyata[10].

Namun, ada beberapa progres. Yang paling signifikan, Uni Eropa mengesahkan regulasi akuntabilitas korporasi pada 2024 yang mewajibkan perusahaan-perusahaan raksasa untuk menghormati peraturan baru tentang hak asasi manusia, dampak lingkungan, dan iklim. Meskipun Arahan Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan mendapati tantangan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang paling signifikan untuk memperkenalkan kewajiban Aturan uji tuntas hak asasi manusia sesuai dengan Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa – Bangsa.

Uni Eropa harus menolak upaya untuk melemahkan perlindungan hak asasi manusia, lingkungan dan iklim dalam Petunjuk Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan, dan blok regional lainnya harus mengikutinya dengan undang-undang uji tuntas mereka sendiri.

TEKNOLOGI DAN HAK ASASI MANUSIA

Pemilihan umum di Amerika Serikat pada 2024 menyoroti kekuatan raksasa teknologi atas penggunaan teknologi dan diskusi kebijakan, serta kemampuan mereka untuk memfasilitasi pelanggaran atas hak imigran, kelompok ragam gender dan seksualitas dan kelompok lainnya, dan pada akhirnya menggarisbawahi urgensi atas kebijakan hak asasi manusia di bidang teknologi di seluruh dunia. Tanpa regulasi yang memadai, pemerintah dapat menyalahgunakan perangkat pengintai (*spyware)* dan alat pengintai lainnya, dan memperluas ketidaksetaraan dengan mengandalkan teknologi kecerdasan buatan di publik. Sementara itu, perusahaan sosial media berkontribusi atas penyebaran konten kebencian dan kekerasan.

PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI

Teknologi pengenal wajah memberikan efek menakutkan atas hak atas protes di beberapa wilayah di dunia. Di beberapa negara, polisi mengawasi protes damai dengan kamera canggih yang sematkan pada pesawat tanpa awak dan mobil dengan video pengintai. Praktik ini melanggar hak atas privasi, memberikan efek yang mengerikan pada hak untuk berkumpul secara damai dan dapat bersifat diskriminatif.

Teknologi perangkat pengintai digunakan secara luas di beberapa negara di dunia. Teknologi digital baru yang mengancam keamanan seperti penyalahgunaan pelacak iklan daring, proses pengambilan data pengguna internet berdasarkan interaksi mereka dengan iklan mulai bermunculan. Sementara itu, kurangnya transparansi dan kebijakan telah berkontribusi untuk mengaburkan perdagangan teknologi pengintai seperti *spyware*. Pada 2024, ada beberapa bukti yang menunjukkan penjualan dan penggunaan perangkat pengintai yang invasif dan produk-produk pengintai kepada perusahaan dan badan-badan pemerintah di Indonesia. Sementara itu, mahasiswa China dan Hong Kong yang belajar di luar negeri masih menjadi korban pengintaian ketika menggunakan aplikasi dan platform digital. Pelanggaran berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi terkadang dilakukan melalui pengintaian, merupakan ancaman yang semakin serius kepada perempuan dan aktivis ragam gender dan seksualitas di negara-negara termasuk Thailand dan Uganda.

Aktivis masyarakat sipil, termasuk Amnesty International, serta beberapa negara, telah meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran terkait perangkat pengintai. Pada tahun 2024, gugatan hukum terhadap perusahaan perangkat pengintai NSO Group berlanjut di negara-negara termasuk Thailand dan Amerika Serikat, meskipun Israel berupaya untuk mengganggunya. Namun, di tingkat multilateral, upaya untuk mengatasi penyalahgunaan perangkat pengintai cenderung berfokus pada kode etik yang bersifat sukarela. Misalnya, pada tahun 2024, Prancis dan Inggris meluncurkan Pall Mall Process untuk menyatukan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah seputar intrusi siber komersial. Sementara itu, Amnesty International terus menciptakan dan menyediakan alat baru bagi para aktivis untuk melindungi diri mereka sendiri[11].

Pemerintah harus melarang pengawasan di luar hukum dan alat pengawasan yang melanggar hukum dan menerapkan perlindungan yang kuat untuk melindungi dari penyalahgunaan dan memberikan pertanggungjawaban kepada korban.

KEBIJAKAN YANG TIDAK MEMADAI TERHADAP TEKNOLOGI BARU

Pemerintah telah mundur dari komitmen untuk mengatur teknologi baru, sebagian dipicu oleh perubahan dalam pemerintahan Amerika Serikat dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan industri. Negara-negara telah semakin mengintegrasikan teknologi kecerdasan artifisial ke dalam sektor publik dan memungkinkan pengembangan dan perluasan sistem peran kecerdasan artifisial dalam konteks kesejahteraan, kepolisian, migrasi, dan militer. Sering kali teknologi ini digunakan sebagai pembenaran efisiensi pemerintah, penghematan biaya, atau langkah-langkah penghematan lainnya, tetapi, pada kenyataannya, memperparah diskriminasi yang ada, memperkuat ketidaksetaraan gender dan mengakar sistem kekuasaan rasial, kekuatan sosial-ekonomi[12].

Ketergantungan negara yang berkelanjutan pada alat otomatis dalam penyediaan dan pengawasan perlindungan sosial telah menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan[13]. Bahaya ini sebagian disebabkan oleh penerapan teknik baru yang cacat tetapi semakin umum seperti "resolusi entitas", di mana negara-negara, seperti India, mengidentifikasi dan menautkan catatan pribadi di berbagai *database*[14].

Regulasi Kecerdasan Artifisial telah dihalangi secara global oleh narasi yang memosisikan Amerika Serikat dan China sebagai pesaing dalam perlombaan senjata dan dengan demikian mempromosikan pengembangan

kecerdasan artifisial yang cepat dan tidak terkendali baik untuk alasan keamanan nasional, dan di bawah dikotomi palsu antara regulasi dan inovasi.

Pemerintah harus lebih banyak bertindak untuk mengatur teknologi Kecerdasan Artifisial dan perusahaan yang memproduksinya, memastikan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian integral dari desain dan penerapan teknologi baru.

MODEL BISNIS PERUSAHAAN SOSIAL MEDIA

Perusahaan media sosial yang beroperasi dengan kekuatan yang tidak terkendali telah menarik perlindungan yang bertujuan untuk mencegah bahaya bagi individu yang terpinggirkan dan berisiko. Mereka juga terus mengoperasikan model bisnis yang secara sistemik memprioritaskan keterlibatan di atas segalanya, sehingga memungkinkan penyebaran konten kebencian dan kekerasan. Ini membuat anak muda secara khusus ketagihan pada platform mereka, meskipun ada efek yang berbahaya. Pada tahun 2024, secara global, aktivis muda menghadapi ancaman dan pelecehan daring15. Di Filipina, Amnesty International mendokumentasikan serangan "red-tagging" yang menyerang aktivis muda atas kegiatan aktivisme mereka. Uni Eropa menetapkan preseden beragam tentang regulasi teknologi.

Undang-Undang Layanan Digitalnya, yang mulai berlaku pada Februari 2024, menempatkan kewajiban pada platform daring dan mesin pencari untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia16. Komisi Eropa kemudian memutuskan untuk menyelidiki TikTok atas kemungkinan bahwa TikTok telah melanggar peraturan karena gagal melindungi pengguna muda17. Undang-Undang Kecerdasan Artifisial Uni Eropa, yang mulai berlaku pada Agustus 2024, menetapkan batasan untuk beberapa penggunaan kecerdasan artifisial yang paling melanggar hak, meskipun kebijakan tersebut gagal menempatkan orang dan hak-hak mereka sebagai hal utama18.

Kabar baik lainnya, di Ethiopia, korban pelanggaran hak asasi manusia terus membuat kemajuan dalam upaya mereka untuk meminta pertanggungjawaban Facebook, di pengadilan yang dapat diakses oleh mereka, atas kerugian yang telah disebabkan atau dikontribusikan oleh Facebook. Namun, di tempat lain, undang-undang yang diusulkan untuk mengatasi bahaya media sosial sering kali terlalu luas atau berusaha untuk membatasi akses anak-anak dan remaja ke media sosial tanpa mengatasi masalah mendasar dari model perusahaan bisnis sosial atau mempertimbangkan pendapat anak-anak dan remaja secara memadai.

Pemerintah harus mengatur perusahaan media sosial secara memadai untuk melindungi hak asasi manusia. Perusahaan juga harus menjauh dari model bisnis yang melanggar hukum dan berbasis pengawasan.

---

[1] *Obligations of State Parties on Addressing and Eradicating Xenophobia and Its Impact on the Rights of Migrants, Their Families, and Other Non-Citizens Affected by Racial Discrimination, 4 April*

[2] *Primer: Defending the Rights of Refugees and Migrants in the Digital Age, 5 February, The Digital Border: Migration, Technology and Inequality, 21 May*

[3] *"Global: Africans and people of African descent call on Europe to reckon with their colonial legacies", 18 November*

[4] *We Are Facing Extinction: Escalating Anti-LGBTI Sentiment, the Weaponization of Law and Their Human Rights Implications -in Select African Countries, 9 January*

[5] *"Global: Record-breaking 12-month run of global heat underlines urgency of action to deliver climate justice", 5 June*

[6] *"Africa: Richer countries must commit to pay at COP29 as climate change forcibly displaces millions across Africa", 4 November*

[7] *Climate Inaction, Ruled Out! European Court Clarifies State Obligations to Tackle the Climate Crisis, 21 August*

[8] *Amnesty International Recommendations to Parties to the UNFCCC on Human Rights Consistent Climate Action in 2024, 23 October*

[9] *What's Tax Got to Do with It: A Resource Guide on Tax and Human Rights, 17 September*

[10] *Recharge for Rights: Ranking the Human Rights Due Diligence Reporting of Leading Electric Vehicle Makers*, 15 October

[11] "Amnesty International's Security Lab unveils new tools to support civil society against digital threats", 5 June

[12] *Briefing: Gender and Human Rights in the Digital Age*, 10 July

[13] *Briefing: Social protection in the Digital Age*, 6 March

[14] *Use of Entity Resolution in India: Shining a Light on How New Forms of Automation Can Deny People Access to Welfare*, 30 April

[15] *"Three out five young activists face online harassment globally for posting human rights content", 1 July*

[16] *"EU: Landmark Digital Services Act must be robustly enforced to protect human rights", 17 February*

[17] *"EU/Global: European Commission's TikTok probe aims to help protect young users", 19 February*

[18] *"Statement: EU takes modest step as AI law comes into effect", 1 August*

GAMBARAN KAWASAN ASIA PASIFIK

Gejolak politik, represi, dan konflik bersenjata berkontribusi pada situasi hak asasi manusia yang mengkhawatirkan di wilayah Asia-Pasifik. Namun, meskipun menghadapi risiko yang sangat besar, para pembela hak asasi manusia dan aktivis terus menuntut hak-hak mereka dan bersuara menentang penindasan.

Terdapat undang-undang baru yang lebih membatasi hak-hak, termasuk kebebasan berekspresi. Demonstrasi sering kali direspon dengan kekerasan yang melanggar hukum dan mengakibatkan jatuhnya korban. Lawan-lawan politik, pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan masyarakat sipil lainnya menjadi sasaran pengawasan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya, serta pembunuhan di luar hukum. Pelanggaran-pelanggaran ini difasilitasi oleh impunitas, meskipun keputusan pengadilan dan rekomendasi komisi kebenaran memberikan harapan reparasi bagi para korban di Jepang dan Korea Selatan.

Cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi secara perlahan-lahan menyebabkan banyak kehancuran, namun pemerintah kembali gagal mengambil tindakan mendesak yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim dan beradaptasi terhadap bahaya yang berkaitan dengan iklim.

Eskalasi yang signifikan dalam konflik bersenjata di Myanmar mengakibatkan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Hak-hak, terutama hak-hak perempuan dan anak perempuan, menjadi semakin dibatasi di bawah kekuasaan Taliban di Afghanistan, dan represi keras terhadap perbedaan pendapat terus berlanjut di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Korea Utara.

Terdapat kemajuan terhadap pengakuan hak-hak kelompok ragam gender dan seksualitas di beberapa negara. Namun demikian, diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang sistematis terhadap perempuan, anak perempuan dan kelompok ragam gender dan seksualitas masih terus berlangsung. Hak-hak masyarakat adat dan minoritas etnis secara rutin diabaikan selama proyek-proyek ekstraksi dan pembangunan. Pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial, termasuk hak atas perumahan dan pendidikan, masih tetap tinggi. Orang-orang yang melarikan diri dari konflik dan penindasan terlalu sering berada dalam bahaya karena deportasi paksa atau penahanan sewenang-wenang yang tidak terbatas.

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Ruang untuk kebebasan berekspresi terus menyusut di seluruh wilayah. Di negara-negara seperti Indonesia, Nepal dan Papua Nugini, para jurnalis menghadapi kekerasan dan intimidasi. Di Afghanistan, lebih banyak lagi media yang dibredel, termasuk dua stasiun televisi swasta yang dibekukan karena mengkritik Taliban. Jurnalis di Myanmar dijatuhi hukuman penjara yang panjang. Di Pakistan, setidaknya tujuh jurnalis terbunuh dalam serangan yang ditargetkan dan puluhan lainnya ditahan dan didakwa di bawah Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Elektronik (Prevention of Electronic Crimes Act).

Undang-undang baru yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi diberlakukan di Bangladesh, Malaysia, Pakistan dan Vietnam. Undang-undang Keamanan Online (Online Safety Act) yang baru di Sri Lanka berisi kejahatan yang didefinisikan secara samar dan memberikan kewenangan yang luas sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang ini akan digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Di India, undang-undang baru yang menggantikan undang-undang era kolonial juga bersifat membatasi dan kejahatan penghasutan, yang digunakan untuk menekan para pengkritik pemerintah, tetap dipertahankan. Pemerintah Tiongkok memperkenalkan langkah-langkah baru untuk mencegah pengguna internet di daratan menggunakan bahasa gaul (*slang*) dan "ekspresi yang tidak jelas" untuk menghindari sensor online. Di Hong Kong, pihak berwenang mengesahkan Ordonansi Perlindungan Keamanan Nasional yang memperkenalkan definisi luas tentang "keamanan nasional" dan "rahasia negara" yang telah berlaku di daratan Tiongkok, dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan hukuman yang lebih berat.

Para pengkritik pemerintah menghadapi tuntutan hukum di banyak negara. Di Thailand, pengadilan dan pemenjaraan para aktivis pro-demokrasi di bawah *lese-majesty* dan hukum yang membatasi lainnya terus berlanjut. Di Kamboja, seorang jurnalis, yang dikenal secara internasional karena mengekspos pelanggaran hak asasi manusia di kompleks penipuan dunia maya, ditangkap dan didakwa dengan tuduhan penghasutan. Di Singapura, para pengkritik pemerintah, termasuk para penentang hukuman mati, dipaksa untuk memposting "koreksi" karena telah menyebarkan "kebohongan online". Di Laos, dua seniman ditahan karena unggahan satir di media sosial yang mengkritik kondisi jalan yang buruk, sementara di Tiongkok, seorang seniman terkenal ditahan karena karyanya yang telah berumur puluhan tahun yang mengkritik kepemimpinan Partai Komunis.

Kontrol yang ketat terhadap komunikasi daring dan luring di beberapa negara semakin membatasi akses terhadap informasi dan kebebasan berekspresi yang sangat terbatas. Larangan pemerintah Korea Utara untuk berhubungan dengan dunia luar terus berlanjut. Pembatasan internet yang sewenang-wenang diberlakukan di Pakistan. Di Bangladesh dan India, pihak berwenang memberlakukan pemadaman internet sementara dengan dalih untuk menjaga hukum dan ketertiban, tetapi pada praktiknya hal itu digunakan untuk menekan perbedaan pendapat. Di Malaysia, dua pembuat film dari sebuah film yang sebelumnya telah dilarang didakwa dengan tuduhan "melukai perasaan keagamaan".

Kekhawatiran tentang penggunaan teknologi pengawasan terus berlanjut. Di Indonesia, Amnesty International mendokumentasikan penjualan dan penyebaran perangkat pengintai (*spyware*) yang sangat invasif oleh badan-badan negara dan perusahaan swasta. Di Thailand, pengadilan menolak kasus yang diajukan oleh seorang aktivis pro-demokrasi melawan perusahaan intelijen siber NSO Group karena perannya dalam memfasilitasi penggunaan perangkat mata-mata Pegasus untuk meretas ponselnya.

Upaya untuk membungkam kritik di luar negeri oleh beberapa pemerintah menjadi semakin meluas. Pelajar Tiongkok Daratan dan Hong Kong yang melakukan studi di luar negeri terus menjadi sasaran pengawasan. Pihak berwenang Hong Kong mengeluarkan surat perintah penangkapan lebih lanjut dan membatalkan paspor aktivis pro-demokrasi yang tinggal di luar negeri, dan menawarkan imbalan uang untuk informasi yang dapat menyebabkan penangkapan. Seorang pengacara hak asasi manusia yang menangani kasus-kasus politik dan dipulangkan secara paksa ke Tiongkok dari Laos pada tahun 2023, ditahan sambil menunggu persidangan.

Pemerintah harus mencabut atau mengamandemen undang-undang yang melanggar pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi, mengambil langkah-langkah untuk melindungi ekspresi politik dan pendapat lainnya, termasuk untuk melindungi kebebasan media.

KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT

Pemerintah-pemerintah di kawasan ini merespon protes dengan represi. Di Bangladesh, protes mahasiswa yang dipicu oleh pemberlakuan kembali undang-undang yang memberikan kuota pekerjaan di pemerintahan bagi keturunan veteran perang kemerdekaan, direspon dengan kekerasan yang melanggar hukum. Ketika demonstrasi anti-pemerintah menyebar, angkatan bersenjata dikerahkan dan perintah "tembak di tempat" dikeluarkan, yang mengakibatkan hampir seribu orang tewas - lebih banyak lagi yang terluka. Di Indonesia, polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan dan tidak perlu terhadap massa yang memprotes perubahan undang-undang pemilu. Meskipun usulan amandemen tersebut kemudian ditarik kembali, banyak demonstran yang terluka dan ratusan orang ditangkap secara sewenang-wenang.

Di Nepal, protes dibubarkan secara paksa dan para demonstran ditahan. Polisi di ibu kota, Kathmandu, menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstrasi dalam beberapa kesempatan. Di India, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi terhadap protes petani mengakibatkan setidaknya satu orang tewas. Pihak berwenang Hong Kong mengerahkan polisi untuk mencegah peringatan penumpasan Tiananmen 1989. Seperti tahun-tahun sebelumnya, beberapa orang ditahan karena berpartisipasi dalam acara-acara semacam itu. Di Papua Nugini, polisi menangkap dan mendakwa beberapa orang yang memprotes penggusuran mereka dari permukiman informal di ibu kota Port Moresby. Menyusul deklarasi darurat militer oleh presiden Korea Selatan, hak-hak dasar termasuk hak untuk berkumpul ditangguhkan - sebuah langkah yang dengan cepat dibatalkan oleh Majelis Nasional. Dia kemudian diberhentikan dari jabatannya dan surat perintah penangkapannya dikeluarkan pada akhir Desember.

Para pendukung untuk mengakhiri perang di Gaza dan hak-hak orang Palestina menghadapi pelecehan dan penangkapan. Di Fiji, polisi melarang para demonstran membawa bendera Israel dan Palestina serta mengintimidasi para pengunjuk rasa damai. Pihak berwenang di Singapura menyelidiki beberapa orang karena memprotes penjualan senjata ke Israel dan mendakwa tiga orang lainnya yang berusaha mengantarkan petisi menentang perang ke Istana Presiden. Di Maladewa, dua orang perempuan ditangkap dalam sebuah demonstrasi yang menuntut pemboikotan terhadap produk-produk Israel. Di Malaysia, polisi menahan para pengunjuk rasa pro-Palestina di luar kedutaan besar Amerika Serikat di ibu kota Kuala Lumpur.

Hak atas kebebasan berserikat juga mendapat serangan lebih lanjut. Di Thailand, pengadilan memerintahkan pembubaran partai oposisi *Move Forward Party* yang memenangkan jumlah kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen 2023. Sebelas dari eksekutif partai tersebut juga dilarang mencalonkan diri. Di Filipina, pemerintah terus “mencap merah” para aktivis dan organisasi yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok komunis terlarang dengan menuduh mereka melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan terorisme. Di Bangladesh, India, Pakistan, dan Sri Lanka, buruh garmen dicegah untuk menggunakan hak mereka untuk berserikat dalam rangka memperjuangkan upah yang rendah dan informalisasi tenaga kerja yang ekstrem. Di Bangladesh, setidaknya satu buruh garmen terbunuh dan puluhan

buruh lainnya terluka ketika polisi menembaki mereka yang sedang berunjuk rasa menuntut upah yang lebih tinggi.

Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai dilindungi. Penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap para pengunjuk rasa harus dicegah dan hukum, kebijakan, dan praktik-praktik yang melanggar hak-hak berkumpul dan berserikat secara damai harus ditinjau ulang dan diubah.

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG SEHAT

Cuaca ekstrem, kejadian yang terjadi secara perlahan, dan polusi udara beracun yang diperburuk oleh perubahan iklim memiliki konsekuensi yang menghancurkan di sepanjang, yang secara tidak proporsional memengaruhi masyarakat yang paling miskin dan paling terpinggirkan. Negara-negara berpenghasilan tinggi dan penghasil emisi tinggi di kawasan ini bekerja sama dengan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya untuk memblokir kesepakatan di COP29 mengenai tingkat pendanaan iklim yang memadai yang dituntut oleh negara-negara berpenghasilan rendah.

Asia Selatan kembali terkena dampak dari panas ekstrem dan banjir besar yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Di negara bagian Assam, India, banjir mengakibatkan kematian sedikitnya 113 orang. Di Bangladesh, 500.000 orang mengungsi. Banjir dan tanah longsor di Afghanistan, Pakistan dan Nepal juga mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Polusi udara di ibu kota India, Delhi, dan di kota-kota di Pakistan mencapai rekor tertinggi yang menyebabkan kematian di kedua negara tersebut, terutama di kalangan masyarakat yang terpinggirkan.

Beberapa kemajuan dalam mengurangi emisi karbon atau meningkatkan perlindungan lingkungan terlihat jelas, namun secara keseluruhan, respons regional terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan masih belum memadai. Di Tiongkok, energi yang dihasilkan dari sumber bahan bakar non-fosil untuk pertama kalinya melebihi energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Namun, laju pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri tetap mengkhawatirkan. Di Papua Nugini, 30% lahan dialokasikan untuk konservasi, meskipun negara ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Sebuah keputusan penting di pengadilan di Korea Selatan mengharuskan pemerintah untuk merevisi target emisi rumah kaca untuk melindungi hak-hak generasi mendatang. Negara-negara Kepulauan Pasifik mendukung dimulainya sidang di Mahkamah Internasional mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara terkait perubahan iklim.

Banyak pemerintah negara lain yang gagal memenuhi target pengurangan bahan bakar fosil dan target-target lainnya, bahkan ketika mereka telah berkomitmen untuk melakukannya. Investasi Jepang dalam proyek-proyek gas alam cair di luar negeri terus merongrong upaya global untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Australia merusak kemajuan dengan rencananya untuk meningkatkan, bukannya mengurangi, produksi batu bara dan gas pada tahun 2030. Undang-undang baru di Selandia Baru melemahkan perlindungan lingkungan, dan rancangan undang-undang dan peraturan energi di Indonesia dikritik karena gagal memfasilitasi transisi menuju emisi nol bersih. Meskipun mengalami kerugian yang parah akibat iklim, target perubahan iklim India terus dinilai "sangat tidak memadai".

Para pembela hak asasi manusia di bidang lingkungan terus menjadi sasaran karena pekerjaan mereka. Mereka termasuk seorang tokoh terkemuka dalam gerakan perubahan iklim yang dipenjara di Vietnam, yang melakukan mogok makan untuk ketiga kalinya sebagai bentuk protes terhadap kondisi penahanan yang menyedihkan. Di Kamboja, 10 aktivis lingkungan yang terkait dengan gerakan Mother Nature dihukum karena "bersekongkol" dan "menghina Raja".

Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam kesiapsiagaan dan adaptasi bencana serta memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kelompok-kelompok lain yang terdampak secara tidak proporsional akibat krisis iklim, termasuk dengan mencari bantuan internasional dan pendanaan iklim, jika diperlukan. Negara-negara berpenghasilan tinggi dan negara penghasil emisi tinggi lainnya harus memimpin dalam mitigasi iklim, termasuk dengan menghentikan perluasan produksi bahan bakar fosil, mengakhiri subsidi bahan bakar fosil, dan memastikan bahwa kebijakan iklim mereka konsisten untuk menjaga pemanasan global tetap di bawah 1,5°C.

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG, SERTA PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK LAINNYA

Para pembela hak asasi manusia, aktivis politik, dan lainnya menjadi sasaran penangkapan dan penahanan sewenang-wenang di banyak negara di kawasan ini. Mereka yang ditahan sering mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

Di Afghanistan, lebih dari 20.000 orang, termasuk 1.500 perempuan, dilaporkan dipenjara. Mereka termasuk yang dianggap sebagai lawan politik dan individu yang dituduh melanggar kode moralitas Taliban. Tahanan berisiko mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Pembunuhan di luar hukum terhadap para tahanan juga banyak dilaporkan. Pihak berwenang Korea Utara terus menahan ribuan orang di kamp-kamp penjara politik, di mana mereka menghadapi kondisi yang tidak manusiawi dan penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya, termasuk kekerasan seksual.

Di Tiongkok, para aktivis hak-hak buruh dan jurnalis warga menjadi bagian yang dijatuhi hukuman penjara karena mengadvokasi hak-hak asasi manusia. Di Hong Kong, 45 aktivis pro-demokrasi dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan "bersekongkol untuk melakukan subversi" karena mengorganisir pemilihan umum yang tidak resmi. Para tahanan politik di Vietnam yang menjalani hukuman panjang karena menentang pemerintah menderita sakit dan tidak diberi akses ke perawatan medis. Di Pakistan, lebih dari 100 warga sipil ditahan dalam tahanan militer karena berpartisipasi dalam protes menentang penangkapan mantan perdana menteri Imran Khan pada tahun 2023; 85 orang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan militer. Para pemimpin oposisi senior tetap berada dalam tahanan menunggu persidangan. Kampanye anti-narkoba pemerintah Sri Lanka yang banyak dikritik dan sangat kejam terus berlanjut, yang menyebabkan penahanan sewenang-wenang terhadap puluhan ribu orang, terutama dari kelompok-kelompok sosial ekonomi yang terpinggirkan.

Pihak berwenang harus menahan diri untuk tidak menyalahgunakan sistem peradilan terhadap lawan-lawan politik dan pihak-pihak lain yang menggunakan hak-hak mereka yang sah atas kebebasan berekspresi, protes damai, dan hak asasi manusia lainnya. Negara harus membebaskan dan memberikan kompensasi kepada mereka yang ditahan secara sewenang-wenang serta melarang dan mengkriminalisasi penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

IMPUNITAS DAN HAK ATAS KEBENARAN, KEADILAN, DAN REPARASI

Meskipun ada beberapa kemajuan menuju keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia di beberapa negara, impunitas masih menjadi norma di kawasan ini dan mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut.

Di Pakistan dan Filipina, di mana hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali pertanggungjawaban atas pola penghilangan paksa yang telah berlangsung lama, para aktivis hak buruh dan hak atas tanah, lawan-lawan politik, dan para wartawan termasuk di antara mereka yang dihilangkan secara paksa sepanjang tahun. Kurangnya akses terhadap keadilan di Afghanistan semakin memungkinkan budaya impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut. Pemerintah Tiongkok tidak mengambil langkah apapun untuk menetapkan pertanggungjawaban atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap anggota etnis Uighur dan kelompok-kelompok yang sebagian besar beragama Islam di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Pemerintah India tidak hanya gagal melakukan intervensi untuk menghentikan kekerasan etnis di negara bagian Manipur, tetapi juga tidak melakukan penuntutan terhadap anggota kelompok bersenjata yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia selama kekerasan tersebut. Di Papua, Indonesia, pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil terus berlanjut dengan impunitas dalam konteks perjuangan separatis bersenjata.

Ada juga saat-saat penuh harapan. Di Jepang, Mahkamah Agung memutuskan bahwa para korban dari hukum "eugenika", di mana lebih dari 16.000 orang yang memiliki kecacatan atau penyakit kronis disterilkan secara paksa, harus menerima kompensasi. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh komisi kebenaran di Korea Selatan tentang adopsi paksa terhadap ribuan bayi antara tahun 1961 dan 1987 merekomendasikan reparasi bagi para korban. Di Bangladesh, pemerintah sementara yang baru, membentuk komisi penyelidikan untuk menyelidiki penghilangan paksa terhadap para aktivis, lawan politik, dan lainnya antara tahun 2009 dan 2024.

Namun, upaya-upaya keadilan tersendat di tempat lain. Di Nepal, perundang-undangan yang baru diadopsi yang dimaksudkan untuk memajukan keadilan atas kekejaman yang dilakukan selama era konflik bersenjata tidak sepenuhnya sesuai dengan standar internasional dan berpotensi melindungi beberapa pelaku dari tuntutan hukum. Di Sri Lanka, masyarakat sipil menolak usulan legislasi untuk membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang baru, termasuk karena kurangnya konsultasi yang berarti dengan para korban, dan kegagalan pemerintah untuk mengimplementasikan rekomendasi yang dibuat oleh badan-badan investigasi sebelumnya.

Pemerintah harus memperkuat upaya-upaya untuk melawan impunitas dengan melakukan investigasi yang cepat, independen, tidak memihak, dan efektif terhadap kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius, menyeret para pelaku ke pengadilan, serta memastikan adanya pemulihan yang efektif bagi para korban.

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Ketika konflik bersenjata di Myanmar meningkat, militer dan beberapa kelompok oposisi bersenjata dituduh melakukan kejahatan perang dan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional. Kampanye militer dengan serangan tanpa pandang bulu dan langsung terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil semakin meningkat sehingga jumlah korban tewas mencapai lebih dari 6.000 orang sejak kudeta tahun 2021. Pengiriman bahan bakar avtur masih terus mencapai kelompok militer meskipun ada langkah-langkah internasional untuk menghentikan pasokan. Kelompok oposisi bersenjata Tentara Arakan dituduh membakar rumah-rumah dan membunuh warga sipil Rohingya, menyebabkan banyak orang mengungsi dari kampung halaman mereka di negara bagian Rakhine.

Di Afghanistan, serangan oleh kelompok-kelompok bersenjata termasuk Negara Islam di Provinsi Khorasan, yang sebagian besar menargetkan komunitas Syiah-Hazara, mengakibatkan lebih banyak korban masyarakat sipil. Korban masyarakat sipil juga dilaporkan setelah pengeboman udara militer Pakistan terhadap posisi-posisi Taliban di sepanjang perbatasan.

Semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus menghormati hukum humaniter internasional, termasuk dengan menghentikan serangan langsung terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, serta serangan tanpa pandang bulu.

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Krisis kemanusiaan di Afghanistan semakin memburuk. Menurut PBB, lebih dari separuh populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan, dengan 85% hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1 per hari. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan masalah bagi semua orang, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, dengan Uni Eropa memperingatkan bahwa hanya 10% yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Di Korea Utara, 40% dari populasi dilaporkan mengalami kekurangan gizi. Kebijakan dan tindakan pemerintah Korea Utara merupakan faktor penyebab yang signifikan terhadap situasi kemanusiaan yang mengerikan ini.

Pihak berwenang di beberapa negara tetap melakukan penggusuran paksa dan pembongkaran rumah yang melanggar hak atas perumahan. Di India, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa penggusuran paksa dan pembongkaran properti merupakan tindakan ilegal, tapi hanya setelah ribuan rumah dihancurkan dalam beberapa tahun terakhir dalam kampanye pemerintah untuk “menghukum” orang-orang muslim atas kekerasan komunal. Di Mongolia, pihak berwenang secara paksa menggusur hampir 2.000 keluarga dari tanahnya di ibu kota negara, Ulaanbaatar. Di Nepal, keluarga, biasanya dari komunitas termarginalisasi Dalit and Tharu, yang tinggal di permukiman informal digusur secara paksa. Tidak ada ganti rugi bagi ribuan orang yang digusur secara paksa dari situs Warisan Dunia Angkor di Kamboja dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang lain hidup berada di bawah ancaman penggusuran.

Jutaan anak-anak dalam kawasan masih tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Taliban tetap mempertahankan larangan pendidikan pada anak-anak perempuan di atas pendidikan dasar. Jutaan anak-anak di Myanmar putus sekolah yang disebabkan oleh konflik bersenjata and serangan yang disengaja oleh militer pada fasilitas pendidikan. Penutupan sekolah lebih lanjut oleh pemerintah Tiongkok yang mengancam budaya dan bahasa orang Tibet. Pengurangan pengeluaran di sektor pendidikan adalah salah satu perhatian yang menjadi sorotan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konteks penurunan investasi publik terhadap layanan sosial di Laos.

Laporan tentang kerja paksa dan kondisi kerja yang buruk juga berlanjut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerangkan bahwa kerja paksa di Korea Utara merupakan kondisi yang tersebar luas dan terinstitusionalisasi and PBB menyatakan bahwa penggunaan kerja paksa dalam tahanan mungkin dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atas perbudakan. Pekerja kebun teh Malaiyaha Tamil menuduh pemerintah Sri Lanka atas kegagalan untuk melindungi pekerja dari kerja paksa, perbudakan hutang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Pemerintah harus bertindak untuk memastikan hak ekonomi, sosial, termasuk hak atas makanan, pelayanan kesehatan, perumahan dan pendidikan kepada semua orang tanpa pandang bulu, dan menghapus praktik kerja paksa.

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Diskriminasi berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tersebar luas di seluruh wilayah. Di Afghanistan, dimana perempuan dan anak perempuan menjadi korban kejahatan atas kemanusiaan atas persekusi gender, Taliban juga memberlakukan pembatasan yang lebih ketat sehingga

membatasi aspek-aspek kehidupan mereka. Banyak yang ditangkap karena tidak mematuhi peraturan tentang pakaian berpakaian, terdapat juga laporan atas pemerkosaan dan bentuk pelanggaran seksual lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan. Tingkat kekerasan berbasis gender meningkat tajam; kelompok hak asasi perempuan melaporkan bahwa terdapat lebih dari 300 perempuan dan anak-anak perempuan yang dibunuh sepanjang tahun ini.

Di tempat lain, pemerintah-pemerintah gagal untuk mengambil langkah yang cukup untuk mengatasi tingkat pemerkosaan, pelecehan dan kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain terhadap perempuan dan anak perempuan. Di Korea Selatan, pertumbuhan gambar and video *deepfake* online dilihat oleh kelompok perempuan merupakan "kedaruratan nasional". Di Maldives, pemerintah gagal untuk bertindak atas rekomendasi badan perjanjian PBB (*UN Treaty Body*) untuk membuat praktik sunat perempuan dan kekerasan rumah tangga sebagai tindak kriminal khusus.

Di India, pemerkosaan dan pembunuhan seorang dokter koas di tempat kerjanya memicu protes berskala nasional. Diskriminasi berdasarkan kasta di India juga terus berlangsung untuk memicu kekerasan seksual dan kekerasan-kekerasan lainnya kepada perempuan Dalit. Dalam kesempatan tertentu, seorang perempuan dibakar hidup-hidup setelah dia melaporkan kekerasan seksual di Madya, negara bagian Pardesh. Impunitas atas kekerasan terhadap perempuan and anak-anak perempuan Dalit di Nepal.

Pemerintah harus mengimplementasikan tindakan yang komprehensif untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak perempuan, termasuk menyelesaikan akar masalah dari diskriminasi berbasis gender yang bersifat interseksional, termasuk memastikan akses terhadap keadilan, perlindungan dan dukungan lain untuk penyintas, dan mengakhiri impunitas bagi para pelaku.

HAK-HAK KELOMPOK RAGAM GENDER DAN SEKSUALITAS

Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memberi perizinan kesetaraan pernikahan bagi kelompok ragam gender dan seksualitas. Putusan pengadilan di beberapa negara lain juga memajukan hak-hak kelompok ragam gender dan seksualitas. Di Korea Selatan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pasangan sesama jenis berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama dengan pasangan heteroseksual. Di Tiongkok, pengadilan memberikan hak kunjungan anak kepada seorang wanita yang memiliki hubungan sesama jenis. Di Jepang, dua putusan pengadilan tinggi yang terpisah memutuskan bahwa larangan pernikahan sesama jenis tidak konstitusional. Di Nepal, sebuah putusan Mahkamah Agung mengakui hak seorang wanita transgender untuk mendapatkan identitas gendernya diakui dalam dokumen resmi.

Namun, kelompok ragam gender dan seksualitas masih terus mengalami kekerasan, diskriminasi dan, di beberapa negara, kriminalisasi. Hubungan sesama jenis yang dilakukan atas dasar suka sama suka tetap dapat dihukum mati di Afghanistan. Di Tiongkok, para aktivis ragam gender dan seksualitas menghadapi risiko penahanan sewenang-wenang. Kelompok transgender tetap berada dalam risiko kekerasan. Di Fiji, terdapat protes dari kelompok-kelompok hak asasi manusia ketika pihak berwenang gagal menyelidiki secara efektif kematian seorang pekerja seks transpuan setelah ia diculik dan diserang dengan kejam.

Pemerintah harus memperkuat perlindungan bagi kelompok ragam gender dan seksualitas, termasuk dengan tidak mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis berdasarkan persetujuan, mengadopsi undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif, dan memastikan akses terhadap pengakuan gender secara hukum. Semua laporan kekerasan dan pelanggaran lainnya terhadap kelompok ragam gender dan seksualitas harus diselidiki secara efektif dan para pelakunya diadili.

HAK-HAK MASYARAKAT ADAT, DAN DISKRIMINASI BERBASIS ETNIS DAN KETURUNAN

Hak-hak Masyarakat Adat mengalami kemunduran di beberapa negara. Masyarakat Adat serta kelompok minoritas berbasis etnis dan keturunan terus terdampak secara tidak proporsional oleh marjinalisasi dan diskriminasi di seluruh wilayah.

Di sisi lain, Masyarakat Adat di Taiwan memenangkan hak untuk menggunakan nama-nama Adat yang bukan dalam bahasa Mandarin, dalam dokumen-dokumen resmi. Sebaliknya, pemerintah Selandia Baru memberlakukan undang-undang baru dan mengusulkan undang-undang lain yang mengecilkan hak-hak suku Māori, yang memicu protes di seluruh wilayah negara tersebut. Di negara lain, termasuk Indonesia dan Malaysia, proyek-proyek pembangunan di atas tanah yang diklaim oleh Masyarakat Adat terus berlanjut tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Di Mongolia, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat penggembala.

Di Australia dan Selandia Baru, Masyarakat Adat secara signifikan kurang terwakili dalam sistem peradilan pidana. Di Australia, anak-anak Aborigin dan Kepulauan Selat Torres mengalami tingkat penahanan yang tinggi - tiga anak laki-laki Aborigin dilaporkan meninggal dalam tahanan di Australia Barat. Di Vietnam, Masyarakat Adat Montagnard terus menghadapi diskriminasi, dan lebih dari 100 orang dihukum atas tuduhan terorisme dalam pengadilan yang tidak adil sehubungan dengan serangan terhadap pos polisi pada tahun 2023.

Pemerintah Tiongkok melanjutkan penindasannya terhadap kelompok etnis non-Han, termasuk dengan menahan secara sewenang-wenang tokoh-tokoh budaya dan agama. Ratusan kejahatan kebencian dilaporkan terjadi terhadap Muslim dan agama minoritas lainnya di India, dan di mana lebih dari 100 orang dihukum karena membakar rumah-rumah Dalit pada tahun 2014.

Pihak berwenang harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjamin hak-hak Masyarakat Adat serta hak-hak etnis dan keturunan minoritas, termasuk dengan mencabut atau mengubah legislasi dan kebijakan yang mendiskriminasi mereka, memprioritaskan kebijakan dan program untuk menghapuskan diskriminasi struktural dalam sistem peradilan pidana dan di tempat lain, dan memastikan adanya konsultasi yang berarti serta persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan untuk proyek-proyek pembangunan serta proyek-proyek dan keputusan-keputusan lain yang berdampak pada mereka.

HAK PENGUNGSI DAN MIGRAN

Australia, Jepang, Malaysia, dan Thailand adalah beberapa negara yang terus mengizinkan penahanan paksa secara sewenang-wenang para pengungsi dan migran yang tidak terbatas. Di Malaysia, kekhawatiran atas penahanan anak-anak dan terdapat laporan yang berlangsung atas kondisi yang mengkhawatirkan dan kekerasan di fasilitas penahanan imigrasi. Di Thailand, PBB menemukan kondisi penahanan yang menyedihkan atas 40 lebih kelompok Uyghur pencari suaka, yang ditahan selama lebih dari 10 tahun, yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

Orang-orang yang lari dari konflik bersenjata dan represi dalam ancaman dikembalikan secara paksa. Penjaga perbatasan di Bangladesh secara ilegal mengembalikan orang-orang Rohingya yang kabur dari konflik bersenjata dari negara bagian Rakhine di Myanmar; para pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh terus berada dalam kondisi yang menyedihkan. Otoritas Thailand diduga berkolaborasi dengan pemerintah Vietnam untuk menangkap beberapa pengungsi Montagnard yang menunda deportasi mereka dari Vietnam dimana mereka berisiko atas pelanggaran hak asasi manusia. Otoritas Pakistan menggunakan kebijakan deportasi, memaksa puluhan ribu pengungsi ke Afghanistan walaupun ada desakan untuk perlindungan terhadap orang-orang Afghanistan yang melarikan diri dari diskriminasi dan penindasan yang sistemik disana.

Pekerja migran di beberapa negara bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Perdagangan manusia juga menjadi perhatian di kawasan ini. Di Korea Selatan, kebakaran di pabrik membunuh 23 orang, sebagian besar adalah pekerja migran. Di Taiwan, pekerja migran Indonesia ditemukan bekerja dalam sebuah kapal perikanan selama setahun tanpa dibayar atau mendapat akses kontak dengan dunia luar sebelum pemerintah turun tangan. Di Kamboja, perdagangan manusia dan kerja paksa tetap menjadi perhatian di beberapa lokasi penipuan, badan perjanjian PBB menyatakan keprihatinannya atas perdagangan seks di Laos.

Pemerintah harus berhenti menahan para pencari suaka karena status mereka sebagai imigran dan mengizinkan mereka untuk mencari perlindungan internasional. Deportasi di luar hukum harus segera dihentikan dan prinsip anti-pengusiran (*non-refoulement*) harus dihormati. Perlindungan atas perdagangan manusia dan kerja paksa harus diperkuat dan korban perdagangan manusia harus diberikan dukungan hukum dan bentuk dukungan lainnya.

HUKUMAN MATI

Tekanan untuk penghapusan hukuman mati di Jepang semakin meningkat setelah hukuman mati terhadap seorang pria berusia 88 tahun, yang telah menghabiskan lebih dari 45 tahun dalam deret tunggu hukuman mati, dibatalkan setelah seorang hakim menemukan bahwa bukti-bukti dalam persidangan awal atas kasus pembunuhan yang melibatkannya telah direkayasa. Eksekusi publik terus berlanjut di Afghanistan, dan ada laporan bahwa Taliban mungkin akan melanjutkan hukuman rajam sampai mati bagi perempuan yang dituduh berzina.

Eksekusi terhadap orang-orang yang dihukum karena pelanggaran terkait narkotika terus berlanjut di beberapa negara, termasuk Tiongkok dan Singapura. Sejauh mana hukuman mati digunakan di Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam masih belum diketahui, tetapi diyakini digunakan secara luas. Sebuah undang-undang baru di Tiongkok menempatkan pembatasan lebih lanjut dalam mengungkapkan informasi tentang

praktik tersebut dan pedoman peradilan baru mendorong penggunaan hukuman mati terhadap individu yang mendukung kemerdekaan Taiwan.

Pemerintah yang masih mempertahankan hukuman mati harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk menghapuskannya dan, sementara itu, menetapkan moratorium resmi atas eksekusi mati.

INDONESIA

Republik Indonesia

Demonstrasi publik direspon dengan kekerasan yang berlebihan dan tidak perlu oleh polisi. Jurnalis menjadi pihak yang ditarget. Kebebasan berekspresi terus direpresi oleh hukum yang bermasalah. Pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan impunitas terus berlanjut di Papua. Proyek-proyek pembangunan yang berdampak kepada masyarakat tidak melalui proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa). Terdapat juga kekhawatiran mengenai kebijakan energi dan rencana pemerintah untuk mencapai emisi nol bersih. Penelitian membuktikan bahwa pemerintah mengimpor and menyebarluaskan spyware dan teknologi pengamatan.

LATAR BELAKANG

Di bulan Februari, Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden. Prabowo sebelumnya dianggap bertanggungjawab atas serangkaian pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1990-an, termasuk penghilangan paksa aktivis. Terdapat keraguan terkait independensi proses pemilihan umum, termasuk kritik terhadap mantan Presiden Joko Widodo dalam berkampanye untuk anaknya, Gibran Rakabuming Raka, meskipun Gibran tidak memenuhi persyaratan formal untuk pemilihan umum. Persyaratan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

KEBEBASAN UNTUK BERKUMPUL

Aparat penegak hukum menggunakan kekuatan yang berlebihan dan tidak perlu terhadap para pengunjuk rasa. Pada tanggal 20 Mei 2024 di People's Water Forum (PWF), konferensi yang mengundang beberapa elemen masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasikan air bersih sebagai salah satu hak asasi manusia, diganggu oleh beberapa anggota paramiliter yang menuntut agar acara tersebut dibatalkan. Rekaman video menunjukkan kelompok paramiliter merusak spanduk, papan reklame, and menyerang para peserta. Mereka menuduh PWF mengganggu World Water Forum ke-10 yang secara bersamaan diadakan oleh pemerintah di Nusa Dua, Bali.[1] Pihak berwenang tidak hanya gagal mencegah serangan tersebut, namun hingga akhir tahun, para pelaku masih belum ditemukan.

Antara tanggal 22-26 Agustus, ribuan demonstran turun ke jalan di berbagai provinsi di Indonesia untuk memprotes upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengubah undang-undang pemilu, terlepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Amandemen tersebut akan memperkenalkan kembali ambang batas yang lebih tinggi bagi partai-partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Rancangan Undang-Undang (RUU) ini juga akan mengizinkan putra mantan presiden Joko Widodo - yang tidak memenuhi persyaratan usia untuk pencalonan - untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena reaksi yang muncul, parlemen menarik RUU tersebut.

Pasukan keamanan menanggapi demonstrasi, yang dikenal sebagai protes "#PeringatanDarurat", dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak perlu serta penangkapan sewenang-wenang. Setidaknya 344 orang ditangkap, 152 orang mengalami luka fisik dan 17 orang menderita akibat gas air mata. Setidaknya satu orang mengalami penghilangan paksa jangka pendek, sementara 65 orang mengalami berbagai pelanggaran, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan penahanan yang tidak dapat komunikasi.[2] Kebanyakan dari mereka yang ditangkap kemudian dibebaskan. Empat belas orang didakwa melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena mengekspresikan kebencian dan merusak properti. Di Bandung, Jawa Barat, sebuah video yang diverifikasi oleh Amnesty International menunjukkan para petugas polisi mengejar seorang pengunjuk rasa yang tidak bersenjata, memukulinya dengan tongkat dan menginjak-injaknya. Pada tanggal 26 Agustus, di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, setidaknya 15 mahasiswa dirawat di rumah sakit setelah polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa. Anak-anak juga terpapar gas air mata yang digunakan di daerah pemukiman.[3]

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Setidaknya 123 kasus penyerangan fisik, serangan digital, ancaman, dan bentuk pembalasan lainnya terhadap 288 pembela hak asasi manusia dilaporkan terjadi sepanjang tahun ini. Para pembela HAM tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, membuat mereka rentan terhadap ancaman dan intimidasi. Sangat

sedikit dari mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut diadili, dan hanya sebagian kecil yang dihukum di pengadilan.

Pada tanggal 17 Juli, Yan Christian Warinussy, seorang pengacara senior dan aktivis hak asasi manusia di Papua, ditembak dan terluka oleh orang tak dikenal di Manokwari, Papua Barat. Serangan tersebut terjadi setelah ia menghadiri persidangan kasus korupsi yang melibatkan auditor negara di pengadilan tindak pidana korupsi Manokwari. Hingga akhir tahun, belum ada perkembangan yang diketahui dalam penyelidikan polisi.[4]

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Pada bulan Januari, Amandemen Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai berlaku dan mencakup beberapa perubahan yang dianggap tidak cukup oleh masyarakat sipil. Ada kekhawatiran bahwa Amandemen tersebut masih mempertahankan sanksi pidana untuk pencemaran nama baik yang secara konsisten digunakan untuk merepresi para pembela hak asasi manusia dan tokoh-tokoh oposisi sejak UU ITE pertama kali diterbitkan pada tahun 2016.

Pada tanggal 8 Januari 2024, pembela hak asasi manusia Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dibebaskan dari dakwaan pencemaran nama baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka didakwa melanggar undang-undang ITE karena "menyebarkan informasi palsu" melalui video YouTube yang melaporkan tuduhan bahwa seorang menteri dan anggota militer terlibat dalam industri pertambangan di Papua.

Pada bulan Maret, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tiga pasal dalam KUHP dan peraturan hukum pidana tentang pencemaran nama baik inkonstitusional.

JURNALIS

Jurnalis terus mengalami kekerasan dan intimidasi. Selama protes "#PeringatanDarurat", setidaknya 11 jurnalis di Jakarta dilaporkan menjadi target aparat keamanan. Insiden-insiden yang terjadi meliputi tindakan intimidasi dan ancaman pembunuhan, serta kekerasan psikologis dan fisik, yang mengakibatkan luka-luka serius. Tiga anggota Lembaga Pers Mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah, mengalami gangguan pernapasan dan kehilangan kesadaran karena terpapar gas air mata yang ditembakkan polisi untuk membubarkan demonstrasi.

Pada tanggal 22 Agustus, anggota pasukan keamanan dicurigai memukul dan mengancam untuk membunuh seorang jurnalis yang bekerja untuk kantor berita Tempo, yang sedang meliput demonstrasi di Kompleks Parlemen. Tiga orang polisi tampaknya memukul dan mengintimidasi wartawan tersebut di pos polisi terdekat dan memaksanya untuk menghapus video yang telah direkamnya. Tempo mengirim pengaduan resmi kepada polisi. Sampai akhir tahun ini, tidak ada kemajuan dalam kasus tersebut.

PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN BURUK LAINNYA

Amnesty International mendokumentasikan setidaknya 40 kasus penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dengan sedikitnya 59 korban sepanjang tahun ini. Pada bulan Januari seorang petugas polisi diduga menyiksa empat warga desa Amasing, Maluku Utara. Menurut para korban, mereka sedang dalam perjalanan menuju desa Labuha ketika dihentikan oleh seorang anggota polisi, yang memukuli dan menginjak mereka dan mengarahkan warga lainnya untuk ikut melakukan penyerangan. Polisi membantah terlibat dan menolak untuk mengungkapkan nama pelaku yang dituduh.[5]

Pada bulan Maret, sebuah video berdurasi 16 detik beredar yang menunjukkan seorang pria Papua disiksa di dalam sebuah tong yang berisi air.[6] Insiden ini merupakan bagian dari penyiksaan terhadap tiga orang Papua pada bulan sebelumnya. Menurut sumber yang dapat dipercaya menemukan bahwa insiden tersebut terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dan menyatakan bahwa para pelaku adalah anggota Yonif 300 Raider Braja Wijaya dari Jawa Barat, yang dikirim ke Papua untuk melakukan patroli perbatasan. Setelah awalnya menyangkal terlibat, 13 perwira ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi militer Jawa Barat, yang menyatakan bahwa korban dalam video tersebut merupakan salah satu dari kelompok separatis bersenjata Papua yang mencoba melarikan diri saat ditangkap. satu orang korban kemudian meninggal dunia dan dua orang Papua lainnya dirawat di rumah sakit. Pada akhir tahun, para pelaku belum dibawa ke pengadilan.

PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM

Di Papua, pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil terus berlanjut dengan impunitas dalam konteks konflik antara militer Indonesia dan kelompok separatis bersenjata.

Pada bulan Mei, dalam kesimpulan observasinya, Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan keprihatinannya mengenai pembunuhan di luar hukum terhadap Orang Asli Papua.

Pada bulan Agustus, petugas dari Kantor Polisi Nabire di Papua menangkap Yeremias Magai dan Ken Boga karena dicurigai telah membunuh seorang satpam. Selama interogasi, kedua orang tersebut diduga ditutup matanya dan dipukul dengan tangan kosong dan alat-alat berat termasuk palu. Yermias Magai meninggal karena luka-lukanya. Ken Boga dan keluarga almarhum bersikukuh bahwa mereka tidak bersalah dan menyatakan bahwa interogasi tersebut merupakan upaya untuk memaksa pengakuan dari korban. Pengacara keluarga korban mengadukan kasus ini ke Komnas HAM untuk diselidiki.

Pada bulan Agustus, seorang pilot helikopter Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, dibunuh oleh anggota kelompok bersenjata saat mendarat di Papua. Dia mengantarkan tenaga kesehatan dari sebuah perusahaan swasta.[7] Pada bulan September, seorang warga Selandia Baru lainnya, Philip Mark Mehrtens, seorang pilot pesawat komersial kecil, dibebaskan setelah ditahan lebih dari 19 bulan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sebuah kelompok pro-kemerdekaan di Papua.

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional - proyek-proyek yang dianggap memiliki dampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia - terus berlanjut tanpa adanya konsultasi yang memadai dengan masyarakat yang terdampak. Dalam banyak kasus, proyek-proyek tersebut tidak melalui proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari Masyarakat Adat yang terdampak.

Pada bulan Maret, penduduk Sukaraja, Bukit Raya, Pemaluan dan Bumi Harapan, yang sebagian besar adalah Masyarakat Adat Balik, menerima pemberitahuan dari Otorita Ibu Kota Nusantara yang meminta mereka untuk menghancurkan properti mereka dalam waktu satu minggu. Otoritas beralasan bahwa rumah-rumah tersebut melanggar rencana tata ruang ibu kota baru Indonesia yang diusulkan dan mengirimkan undangan konsultasi kepada masyarakat yang terkena dampak hanya dalam kurun waktu 24 jam sebelum pertemuan. Otoritas kemudian mencabut perintah pembongkaran setelah adanya keberatan dari para penduduk, yang tetap diharuskan pindah dengan kompensasi yang tidak memadai. Pada akhir tahun, para penduduk terus hidup di bawah ancaman penggusuran.

Warga yang terkena dampak Rempang Eco City, sebuah proyek industri terpadu seluas 17.000 hektar di Kepulauan Riau, menghadapi masalah serupa. Pada bulan September, satu tahun setelah aparat keamanan menghadapi warga yang memprotes proyek tersebut dengan kekerasan, individu berpakaian preman terus mengintimidasi dan menyerang warga yang berjaga di sebuah jalan di desa Sungai Bulu. Tiga orang terluka ketika mereka dipukul dengan papan kayu dan helm. Poster-poster yang mengekspresikan penentangan terhadap proyek tersebut juga dirusak.

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG SEHAT

Pada bulan September, pemerintah telah menyelesaikan dua dokumen kebijakan utama: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) dan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Kedua dokumen ini dianggap penting untuk membentuk kebijakan energi Indonesia. Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Komisi VII DPR menyepakati Peraturan Pemerintah tentang RPP KEN, diskusi di DPR tentang RUU EBET masih berlangsung di penghujung tahun.

Organisasi masyarakat sipil menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kedua RUU tersebut, dan meyakini bahwa kedua RUU tersebut masih belum memadai untuk transisi menuju emisi nol bersih. Dalam RPP KEN, pemerintah menurunkan target bauran energi terbarukan, menyesuaikan target tahun 2025 dari 23% menjadi sekitar 17-19%, dan untuk tahun 2030 dari 26% menjadi sekitar 19-21%. RUU EBET masih mengizinkan pengembangan bahan bakar fosil, asalkan disertai dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Selain itu, kedua dokumen tersebut tidak memiliki pertimbangan dampak sosial, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya perampasan lahan lebih lanjut untuk proyek-proyek energi dan memperpanjang ketidakadilan bagi masyarakat.

PENGAWASAN DI LUAR HUKUM *(UNLAWFUL TARGETED SURVEILLANCE)*

Pada bulan Mei, Amnesty International menerbitkan laporan penelitian yang merinci penjualan dan penggunaan perangkat pengintai (*spyware)* dan teknologi pengawasan yang sangat mengganggu dari tahun 2017 hingga setidaknya tahun 2023. Ada banyak contoh impor atau penggunaan *spyware* oleh perusahaan

dan lembaga negara, termasuk Kepolisian Republik Indonesia serta Badan Siber dan Sandi Negara. Peralatan tersebut berasal dari Israel, Yunani, Singapura, dan Malaysia.[8]

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang disahkan pada tahun 2022, secara resmi mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober. Namun, pihak berwenang belum sepenuhnya merumuskan peraturan pelaksanaannya, termasuk membentuk badan perlindungan data khusus seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

---

[1] "Indonesia: Shameful intimidation of participants at People's Water Forum in Bali", 22 May

[2] "Indonesia: Police must be held accountable for repeated unlawful use of force against peaceful protesters", 9 Dec

[3] "Indonesia: "Stop police brutality", 27 August (only available in Bahasa Indonesia)

[4] "Indonesia: Shooting of human rights defender shows increasing threats in Papua", 18 July

[5] "Indonesia: Investigate Brimob members involved in torturing South Halmahera residents", 12 February (only available in Bahasa Indonesia)

[6] "Indonesia: Thoroughly investigate torture in Puncak, evaluate TNI placement in Papua", 3 March (only available in Bahasa Indonesia)

[7] "Indonesia: 'Unlawful killing' of New Zealand pilot in Papua must be investigated", 6 August

[8] *Indonesia: A web of surveillance: Unravelling a murky network of spyware exports to Indonesia*, 1 May

AMNESTY INTERNATIONAL ADALAH GERAKAN GLOBAL UNTUK HAK ASASI MANUSIA. KETIKA TERJADI KEADILAN KEPADA SATU ORANG, HAL ITU PENTING BAGI KITA SEMUA.

HUBUNGI KAMI

Info@amnestyindonesia.org

Amnesty International Indonesia

@amnestyindonesia

@amnestyindo

SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI DUNIA

APRIL 2025

Meskipun ada beberapa perubahan positif pada hukum dan kebijakan di beberapa negara, hak asasi manusia telah diserang di seluruh dunia. Praktik otoriter telah menyebar dan perlindungan yang ada untuk hak asasi manusia telah dikesampingkan, diabaikan atau diinjak-injak.

Laporan tahunan Amnesty International edisi 2025, Situasi Hak Asasi Manusia di Dunia, menilai perkembangan nasional, regional, dan global di berbagai tema hak asasi manusia. Laporan ini mengidentifikasi tren dunia yang terkait dengan pelanggaran dalam konflik bersenjata, penindasan terhadap perbedaan pendapat, diskriminasi, ketidakadilan ekonomi dan iklim, dan penyalahgunaan teknologi untuk melanggar hak asasi manusia. Laporan ini juga menyoroti bagaimana negara-negara kuat telah dengan sengaja merusak sistem berbasis aturan internasional, menghambat penyelesaian masalah yang memengaruhi kehidupan jutaan orang. Banyak dari tren ini merupakan kemunduran yang berisiko diperburuk pada tahun 2025 dan seterusnya.

Laporan ini mendokumentasikan masalah hak asasi manusia selama tahun 2024 di 150 negara, menghubungkan isu-isu global dan regional dan melihat ke masa depan. Laporan ini mencakup seruan untuk tindakan oleh pemerintah dan pihak lain untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Buku ini merupakan bacaan penting bagi para pemimpin pemerintah, pembuat kebijakan, advokat, aktivis, dan siapa pun yang tertarik pada hak asasi manusia.

AMNESTY INTERNATIONAL